



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah dengan pelayanan publik terpadu yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, perlu didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang profesional dan produktif;
 - b. bahwa dalam rangka penataan sumber daya manusia yang mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola pemerintahan daerah, diperlukan informasi jabatan dan kebutuhan komposisi pegawai pada Perangkat Daerah yang diperoleh dari Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Analisis Jabatan yang selanjutnya disebut Anjab adalah dan tata cara untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian dan pengawasan.
10. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat melalui proses penyusunan anjab; dan
 - b. sebagai dasar memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan ASN berdasarkan struktur organisasi di masing-masing Perangkat Daerah melalui proses penyusunan ABK.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah:
- a. menjadi dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta Akuntabilitas dengan penyusunan Anjab; dan
 - b. menjadi dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai ABK.

BAB II
PELAKSANAAN ANJAB DAN ABK

Pasal 3

- (1) Anjab dan ABK dilakukan terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.
- (2) Anjab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan informasi jabatan dan peta jabatan.
- (3) Hasil ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah formasi jabatan dan kebutuhan ASN yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan beban kerja jabatan.
- (4) Informasi jabatan dan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Formasi jabatan dan kebutuhan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam :

- | | | |
|-------------|------|---|
| a. Lampiran | I | Anjab dan ABK pada Sekretariat Daerah; |
| b. Lampiran | II | Anjab dan ABK pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah; |
| c. Lampiran | III | Anjab dan ABK pada Inspektorat Daerah; |
| d. Lampiran | IV | Anjab dan ABK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; |
| e. Lampiran | V | Anjab dan ABK pada Dinas Kesehatan; |
| f. Lampiran | VI | Anjab dan ABK pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; |
| g. Lampiran | VII | Anjab dan ABK pada Satuan Polisi Pamong Praja; |
| h. Lampiran | VIII | Anjab dan ABK pada Dinas Sosial; |
| i. Lampiran | IX | Anjab dan ABK pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk |

| | | |
|-------------|-------|---|
| j. Lampiran | X | dan Keluarga Berencana; Anjab dan ABK pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; |
| k. Lampiran | XI | Anjab dan ABK pada Dinas Lingkungan Hidup; |
| l. Lampiran | XII | Anjab dan ABK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; |
| m. Lampiran | XIII | Anjab dan ABK pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; |
| n. Lampiran | XIV | Anjab dan ABK pada Dinas Perhubungan; |
| o. Lampiran | XV | Anjab dan ABK pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian; |
| p. Lampiran | XVI | Anjab dan ABK pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; |
| q. Lampiran | XVII | Anjab dan ABK pada Dinas Pemuda dan Olahraga; |
| r. Lampiran | XVIII | Anjab dan ABK pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; |
| s. Lampiran | XIX | Anjab dan ABK pada Dinas Kelautan dan Perikanan; |
| t. Lampiran | XX | Anjab dan ABK pada Dinas Pariwisata; |
| u. Lampiran | XXI | Anjab dan ABK pada Dinas Kehutanan; |
| v. Lampiran | XXII | Anjab dan ABK pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; |
| w. Lampiran | XXIII | Anjab dan ABK pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; |
| x. Lampiran | XXIV | Anjab dan ABK pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; |
| y. Lampiran | XXV | Anjab dan ABK pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; |
| z. Lampiran | XXVI | Anjab dan ABK pada Badan Keuangan dan |

| | | |
|--------------|------------|---|
| aa. Lampiran | XXVII | Aset Daerah; Anjab dan ABK pada Badan Pendapatan Daerah; |
| bb. Lampiran | XXVII I | Anjab dan ABK pada Badan Kepegawaian Daerah; |
| cc. Lampiran | XXIX | Anjab dan ABK pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; |
| dd. Lampiran | XXX | Anjab dan ABK pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; |
| ee. Lampiran | XXXI | Anjab dan ABK pada Badan Penghubung; |
| ff. Lampiran | XXXII | Anjab dan ABK pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah; |
| gg. Lampiran | XXXII I | Anjab dan ABK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan |
| hh. Lampiran | XXXI V | Anjab dan ABK pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan; |

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Anjab dan ABK sebagai alat untuk menyusun peta jabatan dan uraian jabatan.
- (2) Pelaksana Anjab dan ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Sekretaris Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan Anjab dan ABK maka Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana Anjab dan ABK.
- (4) Tugas Tim Pelaksana Anjab dan ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat antara lain tugas Tim Pelaksana Anjab dan ABK yaitu mengumpulkan data, serta mengumpulkan beban kerja dalam jangka waktu satu tahun.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Anjab dan ABK pada Perangkat Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Evaluasi dan pengendalian pengaturan Analisis Jabatan dan ABK sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 7

Pendanaan atas pelaksanaan Anjab dan ABK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 52);
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 53 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 53);
- c. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 54);

- d. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 81 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 55);
- e. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 56);
- f. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 83 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 83 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 57);
- g. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 84 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 84 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 58);
- h. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 59);

- i. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 60);
- j. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 87 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 87 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 61);
- k. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 88 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 88 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 62);
- l. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 89 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 89 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 63);
- m. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 90 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 90);
- n. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 91 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 65);

- o. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 66);
- p. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 67);
- q. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 94 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 94 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 68);
- r. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 95 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 95 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 69);
- s. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 96 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 96 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 70);

- t. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kehutanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 71);
- u. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 98 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 98 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 72);
- v. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 73);
- w. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penghubung (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 100 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penghubung (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 74);
- x. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 101 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 101 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 75);

- y. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 102 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 102 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 76);
- z. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 103 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 103 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 77);
- aa. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 104 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 78);
- bb. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 105 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 105 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 79);
- cc. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 106 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 80);

- dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 107 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 81 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 107 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 81);
- ee. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 108 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 108 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 82);
- ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 109 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 83 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 109 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 83); dan
- gg. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 110 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 110 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 84);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

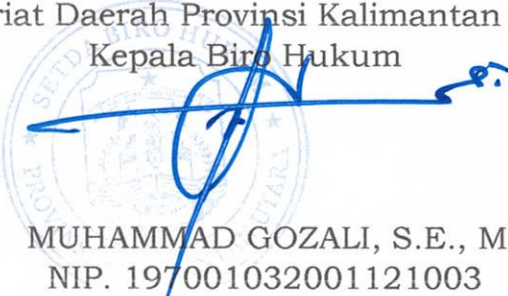
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH

BERITA ACARA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH

1. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 3 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 7 | | 7 | 0 | |
| 4 | ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 5 | ANALIS MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 6 | ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 7 | ANALIS HUKUM PERTANAHAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 8 | ANALIS TOPONIMI DAN DATA WILAYAH | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 9 | ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 10 | ANALIS DEKONSENTRASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 11 | ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 12 | PENGELOLA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 13 | PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 14 | PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 15 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 16 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 17 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 18 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 19 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 20 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 21 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 22 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| | JUMLAH | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 32 | -9 | | |

2. BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI 1 | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAJAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 3 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 5 | | 5 | 0 | |
| 4 | ANALIS DANA HAJI | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 5 | ANALIS SARANA PRASARANA IBADAH | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 6 | ANALIS BINA KEHIDUPAN AGAMA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 7 | PENGELOLA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 8 | ANALIS KESEHATAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 9 | ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 10 | ANALIS KEPENDIDIKAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 11 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 12 | PENGADMINISTRASI KEPENDIDIKAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 13 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 14 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 15 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 16 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 17 | ANALIS KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 18 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 19 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 20 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 21 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 22 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 3 | | | 3 | 0 | |
| 23 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 24 | ANALIS KEMASYARAKATAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 25 | ANALIS NOTIFIKASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 26 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 27 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 28 | ANALIS KEMASYARAKATAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 0 | 1 | 14 | 10 | 42 | -16 | |

3. BIRO HUKUM

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA BIRO HUKUM | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | ANALIS HUKUM AHLI MADYA | | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 3 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 4 | ANALIS HUKUM AHLI MUDA | | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 5 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 6 | PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMA | | | | | 0 | | 4 | -4 | |
| 7 | ARSIPARIS PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 8 | ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | 2 | | | 4 | -2 | |
| 9 | ANALIS ADVOKASI HUKUM | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 10 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 11 | ANALIS HUKUM | | | | 5 | | | 6 | -1 | |
| 12 | ANALIS RANCANGAN NASKAH PERJANJIAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 13 | PENELAHAH JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 14 | PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 15 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 16 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 17 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 18 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 19 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 20 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 21 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 22 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 23 | BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KAB/KOTA | | 1 | | | | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 24 | ANALIS HUKUM AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 25 | ANALIS HUKUM | | | | 2 | | 4 | -2 | |
| 26 | ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | | | | 2 | | 4 | -2 | |
| | JUMLAH | 1 | 1 | 1 | 24 | 8 | 50 | -15 | |

4. BIRO PEREKONOMIAN

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA BIRO PEREKONOMIAN | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 3 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 8 | | 8 | 0 | |
| 4 | ANALIS BADAN LAYANAN UMUM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 5 | ANALIS DATA BADAN LAYANAN UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 6 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 4 | | | 4 | 0 | |
| 7 | ANALIS DUNIA USAHA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 8 | ANALIS EKONOMI KREATIF | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 9 | ANALIS EKONOMI MAKRO | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 10 | ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 11 | ANALIS KEJEMBAGAN USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 12 | ANALIS KERJASAMA DAN PERMODALAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 13 | ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 14 | ANALIS LINGKUNGAN HIDUP | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 15 | ANALIS PENGEMBANGAN ENERGI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 16 | ANALIS PEREKONOMIAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 17 | ANALIS PERTAMBANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 18 | ANALIS SUMBER DAYA AIR | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 19 | PENELAHAH PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 20 | PENGELOLA DATA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 21 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 22 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 23 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 24 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|--------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 25 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 26 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 27 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 28 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| JUMLAH | | 1 | 0 | 1 | 19 | 11 | 41 | -9 | |

5. BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PERTAMA | | | | | 5 | | 18 | -13 | |
| 3 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA MUDA | | | | | 1 | | 5 | -4 | |
| 4 | PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA MADYA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 5 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 6 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 7 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 8 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 9 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 10 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 11 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 12 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 13 | KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 14 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 15 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 16 | ANALIS PRODUK HUKUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 17 | PERANCANG KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 18 | PENELAHAH KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA | | | | 1 | | | 3 | -2 | |
| 19 | PENGELOLA DATABASE | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 20 | PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 21 | KEPALA SUB BAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | | | 0 | | | | 1 | -1 | |
| 22 | ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 23 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 24 | PRANATA BARANG DAN JASA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 25 | KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 26 | PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 27 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 28 | ANALIS LAYANAN UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 29 | ANALIS SISTEM INFORMASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 30 | PENGELOLA DATABASE | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 31 | KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 32 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 33 | ANALIS KELEMBAGAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 34 | ANALIS ADVOKASI HUKUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 35 | ANALIS KESEJAHTERAAN SDM APARATUR | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 36 | ANALIS KERJASAMA DIKLAT | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 37 | PENYUSUN TEKNIS PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI APARATUR DAN NON PENGELOLA UNIT LAYANAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 38 | PENGELOLA UNIT LAYANAN PENGADAAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 39 | PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 40 | PRANATA PENILAIAN KOMPETENSI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| | JUMLAH | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 72 | -48 | | |

| 6. | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 3 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 8 | | 8 | 0 | |
| 4 | ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 5 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 6 | ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 7 | ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 8 | ANALIS PELAKSANAAN ANGGARAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 9 | ANALIS PEMBANGUNAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 10 | ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 11 | ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 12 | PENGEVALUASI PROGRAM DAN KINERJA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 13 | PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 14 | PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 15 | PENYUSUN PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 16 | PENYUSUN RENCANA PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 17 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 18 | PENGELOLA EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 19 | PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 20 | PENGOLAH DATA KINERJA PENGANGGARAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 21 | PENGADMINISTRASI ANGGARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 22 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 23 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 24 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 25 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 26 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 27 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 28 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 29 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 30 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| | JUMLAH | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 45 | -21 | | |

7. BIRO ORGANISASI

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA BIRO ORGANISASI | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | ANALIS SDM APARATUR AHLI MADYA | | | | | 2 | | 3 | -1 | |
| 3 | ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA | | | | | 5 | | 7 | -2 | |
| 4 | ANALIS KELEMBAGAAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 5 | ANALIS JABATAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 6 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 7 | ANALIS ORGANISASI | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 8 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 9 | ANALIS KINERJA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 10 | ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 11 | PENGELOLA AKUNTABILITAS | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 12 | ANALIS PELAYANAN PUBLIK | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 13 | ANALIS TATALAKSANA | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 14 | PENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 15 | PENGELOLA DATA TATA ORGANISASI DAN TATALAKSANA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 16 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | | 1 | | |
| 17 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 18 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 19 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 20 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 21 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| | JUMLAH | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | | 38 | -13 | |

8. BIRO UMUM

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PECAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PECAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAJAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA BIRO UMUM | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | PERENCANA AHLI MADYA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 3 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 4 | BENDAHARA | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 5 | ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN | | | | 2 | | | 1 | 1 | |
| 6 | PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 7 | ANALIS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 8 | PEYUSUN RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 9 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 3 | | | 3 | 0 | |
| 10 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 11 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | | 3 | -2 | |
| 12 | PENGELOLA AKUNTANSI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 13 | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR | | | | 4 | | | 4 | 0 | |
| 14 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 15 | PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 16 | TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 17 | KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 18 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 19 | PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN | | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 20 | PRANATA JAMUAN | | | | | 2 | | 3 | -1 | |
| 21 | KEPALA SUB BAGIAN URUSAN RUMAH TANGGA GUBERNUR | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 22 | PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN | | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 23 | PRANATA JAMUAN | | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 24 | OPERATOR SPEEDBOAT | | | | | 0 | | 2 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 25 | KEPALA SUB BAGIAN URUSAN RUMAH TANGGA WAKIL GUBERNUR | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 26 | PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN | | | | 3 | | | 3 | 0 | |
| 27 | PRANATA JAMUAN | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 28 | OPERATOR SPEEDBOAT | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 29 | KEPALA BAGIAN TATA USAHA | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 30 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 31 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 2 | | | 1 | 1 | |
| 32 | PRANATA KEARSIPAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 33 | PENGADMINISTRASI PERSURATAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 34 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 35 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 36 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 37 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 38 | PENYUSUN NASKAH RAPAT PIMPINAN | | | | 2 | | | 3 | -1 | |
| 39 | ANALIS LAYANAN UMUM | | | | 3 | | | 3 | 0 | |
| 40 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 41 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 42 | PENGEMUDI | | | | 0 | | | 5 | -5 | |
| | JUMLAH | 1 | 2 | 3 | 41 | 6 | | 88 | -35 | |

9. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI 1 | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA | | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 3 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 6 | | 6 | 0 | |
| 4 | PERENCANA AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 5 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 6 | ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 7 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 5 | | | 7 | -2 | |
| 8 | ANALIS PUBLIKASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 9 | ANALIS PROTOKOL | | | | 1 | | | 7 | -6 | |
| 10 | ANALIS PELAYANAN | | | | 1 | | | 3 | -2 | |
| 11 | PENGELOLA BAHAN PERENCANA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 12 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 13 | PENGELOLA TERJEMAHAN DAN KERJASAMA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 14 | PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 15 | NOTULIS RAPAT | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 16 | PRANATA ACARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 17 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 18 | ANALIS MANAJEMEN PERKANTORAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 19 | ANALIS PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 20 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 21 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 22 | ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 23 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| | JUMLAH | 1 | 0 | 1 | 17 | 10 | 49 | -20 | | |

GOBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PECAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PECAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | KEPALA BAGIAN UMUM | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 3 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEHUMASAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 4 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 5 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 6 | ANALIS HUMAS | | | | 3 | | | 4 | -1 | |
| 7 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 8 | PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 9 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 10 | SEKRETARIS | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 11 | PENGELOLA PERJALANAN DINAS | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 12 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | | 5 | -5 | |
| 13 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 6 | | | 50 | -44 | |
| 14 | PENATA LIPUTAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 15 | PENGENMUDI | | | | 0 | | | 7 | -7 | |
| 16 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 12 | -12 | |
| 17 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 18 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 19 | BENDAHARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 20 | PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 21 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 22 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 23 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 3 | -2 | | |
| 24 | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 25 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 26 | PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 27 | ANALIS HUKUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 28 | ANALIS PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 29 | ANALIS INFRASTRUKTUR | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 30 | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 31 | ANALIS PERTAMBAHAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 32 | ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 33 | ANALIS KESEHATAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 34 | ANALIS PENDIDIKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 35 | ANALIS LEGISLASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 36 | ANALIS PEREKONOMIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 37 | PENYUSUN RISALAH | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 38 | PENGELOLA BAHAN ADMINISTRASI ANGGOTA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 39 | PENGELOLA PERSIDANGAN | | | | 1 | | 4 | -3 | | |
| 40 | PETUGAS PROTOKOL | | | | 0 | | 8 | -8 | | |
| 41 | KEPALA BAGIAN PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 42 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 43 | ANALIS PENGANGGARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 44 | ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 45 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|------|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 46 | ANALIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 47 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 48 | PENGELOLA PENGAWASAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 3 | 1 | 22 | 5 | 142 | -110 | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN



LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 INSPEKTORAT DAERAH

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | INSPEKTUR DAERAH | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | AUDITOR UTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 3 | SEKRETARIS | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 4 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 5 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 6 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 7 | BENDAHARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 8 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 9 | PENGELOLA EVALUASI TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 10 | PENGADMINISTRASI ANGGARAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 11 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 12 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 13 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 14 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 15 | ANALIS ASET NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 16 | PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 17 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 18 | PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 19 | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 20 | AUDITOR MADYA | | | | | | | 0 | -2 | |
| 21 | AUDITOR MUDA | | | | | | | 2 | -4 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 22 | AUDITOR PERTAMA | | | | | | | 12 | -4 | |
| 23 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PERTAMA | | | | | | | 2 | 0 | |
| 24 | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 25 | AUDITOR MADYA | | | | | | | 0 | -2 | |
| 26 | AUDITOR MUDA | | | | | | | 0 | -6 | |
| 27 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MUDA | | | | | | | 1 | 0 | |
| 28 | AUDITOR PERTAMA | | | | | | | 9 | -3 | |
| 29 | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 30 | AUDITOR MADYA | | | | | | | 0 | -2 | |
| 31 | AUDITOR MUDA | | | | | | | 0 | -6 | |
| 32 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MUDA | | | | | | | 1 | 0 | |
| 33 | AUDITOR PERTAMA | | | | | | | 9 | -2 | |
| 34 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PERTAMA | | | | | | | 2 | 0 | |
| 35 | INSPEKTUR INVESTIGASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 36 | PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MADYA | | | | | | | 1 | 0 | |
| 37 | AUDITOR MADYA | | | | | | | 0 | -2 | |
| 38 | AUDITOR MUDA | | | | | | | 1 | -5 | |
| 39 | AUDITOR PERTAMA | | | | | | | 8 | -2 | |
| 40 | AUDITOR PENYELIA | | | | | | | 0 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 41 | AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 42 | AUDITOR PELAKSANA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| | JUMLAH | 1 | 5 | 2 | 7 | 45 | 115 | -55 | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Ttd

SURIANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD SOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 1 | | | | | 1 | 0 | | |
| 2 | PENGAWAS MADYA | | | | | 21 | 22 | -1 | | |
| 3 | PAMONG BUDAYA PERTAMA | | | | | 1 | 3 | -2 | | |
| 4 | PRANATA KOMPUTER PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 5 | PENERJEMAH PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 6 | PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PERTAMA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 7 | PAMONG KESENIAN | | | | | | 1 | -1 | | |
| 8 | PAMONG CAGAR BUDAYA | | | | | | 2 | -2 | | |
| 9 | PAMONG PERMUSEUMAN | | | | | | 2 | -2 | | |
| 10 | PAMONG BUDAYA FILM | | | | | | 2 | -2 | | |
| 11 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 12 | PENGAWAS SEKOLAH MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 13 | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 14 | ANALIS PENYELENGGARAAN UJIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 15 | PENGELOLA BANK SOAL | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 16 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN BMD | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 17 | BENDAHARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 18 | ANALIS LAPORAN KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 19 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 20 | ANALIS DATA INFORMASI | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 21 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PECAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PECAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 22 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 23 | PENATA KUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 24 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 3 | | 3 | 0 | | |
| 25 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 3 | -2 | | |
| 26 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPECAWAIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 27 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 3 | | 2 | 1 | | |
| 28 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 29 | ANALIS KERJASAMA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 30 | ANALIS TATA USAHA | | | | 5 | | 5 | 0 | | |
| 31 | PENGELOLA DATA BASE PENDIDIKAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 32 | PENGELOLA KEPECAWAIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 33 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 4 | | 2 | 2 | | |
| 34 | PENGADMINISTRASI KEPECAWAIAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 35 | PENGADMINISTRASI PERSURATAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 36 | PENATA KEARSIPAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 37 | PENGENMUDI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 38 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 39 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 40 | KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 41 | PENGEMBANG TEKNOLOGI PENDIDIKAN AHLI MUDA PAMONG BUDAYA MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 42 | PAMONG BUDAYA MUDA | | | | | 1 | 2 | -1 | | |
| 43 | ANALIS MUTU PENDIDIKAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 44 | ANALIS SOSIAL BUDAYA | | | | 2 | | 1 | 1 | | |
| 45 | ANALIS KERJASAMA KEBUDAYAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 46 | ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 47 | ANALIS DATA DAN INFORMASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 48 | KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN KHUSUS | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 49 | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINA KARAKTER | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 50 | ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 51 | ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 52 | ANALIS KELEMBAGAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 53 | KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMA | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 54 | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINA KARAKTER | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 55 | ANALIS KELEMBAGAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 56 | ANALIS KELEMBAGAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 57 | ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 58 | KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMK | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 59 | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINA KARAKTER | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 60 | ANALIS KELEMBAGAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 61 | ANALIS KELEMBAGAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 62 | ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 63 | ANALIS PELAKSANAAN KEMITRAAN PENDIDIKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 64 | KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 65 | PAMONG BUDAYA AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 66 | ANALIS WARISAN BUDAYA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 67 | ANALIS INFORMASI KEBUDAYAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PECAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PECAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 68 | KURATOR SENI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 69 | ANALIS CAGAR BUDAYA DAN KOLEKSI MUSEUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 70 | ANALIS KESENIAN DAN BUDAYA DAERAH | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 71 | PENGELOLA DATA SEJARAH | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 72 | KEPALA UPT TIKP | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 73 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA TIKP | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 74 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 75 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 76 | KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DAN PENYELENGGARAAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 77 | ANALIS INFORMASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 78 | ANALIS TEKNOLOGI PEMBELAJARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 79 | KEPALA SEKSI EVALUASI | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 80 | ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 81 | KEPALA UPT TAMAN BUDAYA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 82 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 83 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 84 | ANALIS SOSIAL BUDAYA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 85 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 86 | KEPALA CABANG DINAS KOTA TARAKAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 87 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 88 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 3 | | 2 | 1 | | |
| 89 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 90 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 91 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 92 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 93 | BENDAHARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 94 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 95 | KEPALA SEKSI SMA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 96 | ANALISIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 97 | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 98 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 99 | KEPALA SEKSI SMK | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 100 | ANALISIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 101 | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 102 | PENGELOLA DATA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 103 | KEPALA CABANG DINAS NUNUKAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 104 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 105 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 106 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 107 | ANALIS TATA USAHA | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 108 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 109 | BENDAHARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 110 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 111 | KEPALA SEKSI SMA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 112 | ANALISIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 113 | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 114 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 115 | KEPALA SEKSI SMK | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 116 | ANALISIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 117 | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 118 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 119 | KEPALA CABANG DINAS MALINAU DAN TANA TIDUNG | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 120 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 121 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 122 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 123 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 124 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 125 | BENDAHARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 126 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 127 | KEPALA SEKSI SMA | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 128 | ANALISIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 129 | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 130 | PENGELOLA DATA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 131 | KEPALA SEKSI SMK | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 132 | ANALISIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 133 | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 134 | PENGELOLA DATA SMAN 1 TARAOKAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 135 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 136 | ANALIS TATA USAHA | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 137 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | | 4 | -3 | |
| 138 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 4 | -4 | |
| 139 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 140 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 4 | -3 | |
| 141 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 142 | GURU PERTAMA | | | | | 11 | | 23 | -12 | |
| 143 | GURU MUDA | | | | | 21 | | 21 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 144 | GURU MADYA | | | | | 16 | 16 | 0 | |
| 145 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 147 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| | SMAN 2 TARAKAN | | | | | | | | |
| 148 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 149 | ANALIS TATA USAHA | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 150 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 4 | -4 | |
| 151 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 4 | -4 | |
| 152 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 3 | | 2 | 1 | |
| 153 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 4 | -3 | |
| 154 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 4 | -4 | |
| 155 | GURU PERTAMA | | | | | 16 | 23 | -7 | |
| 156 | GURU MUDA | | | | | 18 | 18 | 0 | |
| 157 | GURU MADYA | | | | | 13 | 13 | 0 | |
| 158 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 159 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 160 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| | SMAN 3 TARAKAN | | | | | | | | |
| 161 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 162 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 163 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | 4 | -3 | |
| 164 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 4 | -4 | |
| 165 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 166 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 4 | -3 | |
| 167 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 4 | -4 | |
| 168 | GURU PERTAMA | | | | | 8 | 26 | -18 | |
| 169 | GURU MUDA | | | | | 24 | 24 | 0 | |
| 170 | GURU MADYA | | | | | 8 | 8 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 171 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | | |
| 172 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 173 | PRAMU KEBERSIHAN SMAN 4 TARAKAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 174 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 175 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 176 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 177 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 178 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 179 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 180 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 181 | GURU PERTAMA | | | | | 8 | 17 | -9 | |
| 182 | GURU MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 183 | GURU MADYA | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 184 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 186 | PRAMU KEBERSIHAN SMKN 1 TARAKAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 187 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 188 | ANALIS TATA USAHA | | | | 2 | | 3 | -1 | |
| 189 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | 4 | -3 | |
| 190 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 4 | -4 | |
| 191 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 192 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 4 | -3 | |
| 193 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 4 | -4 | |
| 194 | GURU PERTAMA | | | | | 11 | 22 | -11 | |
| 195 | GURU MUDA | | | | | 36 | 36 | 0 | |
| 196 | GURU MADYA | | | | | 13 | 13 | 0 | |
| 197 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 198 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 199 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| | SMKN 2 TARAKAN | | | | | | | | | |
| 200 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 201 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 202 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 203 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 204 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 3 | | | 3 | 0 | |
| 205 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 206 | PENGELOLA DATA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 207 | GURU PERTAMA | | | | | 12 | | 57 | -45 | |
| 208 | GURU MUDA | | | | | 51 | | 18 | 33 | |
| 209 | GURU MADYA | | | | | 20 | | 14 | 6 | |
| 210 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 211 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 212 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| | SMKN 3 TARAKAN | | | | | | | | | |
| 213 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 214 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 215 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | | 4 | -3 | |
| 216 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 4 | -4 | |
| 217 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 218 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 219 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 220 | GURU PERTAMA | | | | | 11 | | 26 | -15 | |
| 221 | GURU MUDA | | | | | 16 | | 16 | 0 | |
| 222 | GURU MADYA | | | | | 7 | | 7 | 0 | |
| 223 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 224 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|------|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 225 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| | SMKN 4 TARAKAN | | | | | | | | | |
| 226 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 227 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 228 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 229 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 230 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 231 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 232 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 233 | GURU PERTAMA | | | | | 1 | | 8 | -7 | |
| 234 | GURU MUDA | | | | | 5 | | 5 | 0 | |
| 235 | GURU MADYA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 236 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 237 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 238 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| | SLBN TARAKAN | | | | | | | | | |
| 239 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 240 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 241 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 242 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 243 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 244 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 245 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 246 | GURU PERTAMA | | | | | 16 | | 116 | -100 | |
| 247 | GURU MUDA | | | | | 5 | | 5 | 0 | |
| 248 | GURU MADYA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 249 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 250 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 251 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 252 | PENGENMUDI SMAN 1 NUNUKAN SELATAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 253 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 254 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 255 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 256 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 4 | -4 | |
| 257 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 258 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 259 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 260 | GURU PERTAMA | | | | | 4 | | 7 | -3 | |
| 261 | GURU MUDA | | | | | 22 | | 22 | 0 | |
| 262 | GURU MADYA | | | | | 9 | | 9 | 0 | |
| 263 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 264 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 265 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| | SMAN 2 NUNUKAN | | | | | | | | | |
| 266 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 267 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 268 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 269 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 270 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 271 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 272 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 273 | GURU PERTAMA | | | | | 2 | | 14 | -12 | |
| 274 | GURU MUDA | | | | | 8 | | 8 | 0 | |
| 275 | GURU MADYA | | | | | 5 | | 5 | 0 | |
| 276 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 277 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 278 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMKN 1 NUNUKAN | | | | | | | | | |
| 279 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 280 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 281 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 282 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 4 | -4 | | |
| 283 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 284 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 285 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 286 | GURU PERTAMA | | | | | 10 | 34 | -24 | | |
| 287 | GURU MUDA | | | | | 27 | 27 | 0 | | |
| 288 | GURU MADYA | | | | | 10 | 10 | 0 | | |
| 289 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 290 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 291 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMAN 1 LUMBIS | | | | | | | | | |
| 292 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 293 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 294 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 295 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 3 | -3 | | |
| 296 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 297 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 298 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 299 | GURU PERTAMA | | | | | 9 | 13 | -4 | | |
| 300 | GURU MUDA | | | | | 8 | 8 | 0 | | |
| 301 | GURU MADYA | | | | | 4 | 4 | 0 | | |
| 302 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 303 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 304 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 1 NUNUKAN | | | | | | | | | |
| 305 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 306 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 307 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | 4 | -3 | | |
| 308 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 4 | -4 | | |
| 309 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 2 | | 1 | 1 | | |
| 310 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 311 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 312 | GURU PERTAMA | | | | | 6 | 15 | -9 | | |
| 313 | GURU MUDA | | | | | 11 | 11 | 0 | | |
| 314 | GURU MADYA | | | | | 17 | 17 | 0 | | |
| 315 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 316 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 317 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMAN 1 KRAYAN | | | | | | | | | |
| 318 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 319 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 320 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 321 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 322 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 323 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 324 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 325 | GURU PERTAMA | | | | | 12 | 18 | -6 | | |
| 326 | GURU MUDA | | | | | 9 | 9 | 0 | | |
| 327 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 328 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 329 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 330 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMKN 1 KRAYAN | | | | | | | | | |
| 331 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 332 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 333 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 334 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 335 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 336 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 337 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 338 | GURU PERTAMA | | | | | 11 | 18 | -7 | | |
| 339 | GURU MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 340 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 341 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 342 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 343 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMKN 1 SEBATIK BARAT | | | | | | | | | |
| 344 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 345 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 346 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 347 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 348 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 349 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 350 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 351 | GURU PERTAMA | | | | | 8 | 29 | -21 | | |
| 352 | GURU MUDA | | | | | 17 | 17 | 0 | | |
| 353 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 354 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 355 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 356 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMKN 1 SEI MENGGARIS | | | | | | | | | |
| 357 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 358 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 359 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 360 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 361 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 362 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 363 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 364 | GURU PERTAMA | | | | | 15 | 22 | -7 | | |
| 365 | GURU MUDA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 366 | GURU MADYA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 367 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 368 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 369 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SLBN NUNUKAN | | | | | | | | | |
| 370 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 371 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 372 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 373 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 374 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 375 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 376 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 377 | GURU PERTAMA | | | | | 6 | 34 | -28 | | |
| 378 | GURU MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 379 | GURU MADYA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 380 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 381 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 382 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 383 | PENGENMUDI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 1 SEMBAKUNG | | | | | | | | | |
| 384 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 385 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 386 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 387 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 388 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 389 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 390 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 391 | GURU PERTAMA | | | | | 7 | 15 | -8 | | |
| 392 | GURU MUDA | | | | | 4 | 4 | 0 | | |
| 393 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 394 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 395 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 396 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMAN 1 SEBUKU | | | | | | | | | |
| 397 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 398 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 399 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 400 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 2 | -2 | | |
| 401 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 402 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 403 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 404 | GURU PERTAMA | | | | | 12 | 17 | -5 | | |
| 405 | GURU MUDA | | | | | 8 | 8 | 0 | | |
| 406 | GURU MADYA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 407 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 408 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 409 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 1 KRAYAN SELATAN | | | | | | | | | |
| 410 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 411 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 412 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 413 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 414 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 415 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 416 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 417 | GURU PERTAMA | | | | | 6 | 14 | -8 | | |
| 418 | GURU MUDA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 419 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 420 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 421 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 422 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMKN 1 TJULIN ONSUI | | | | | | | | | |
| 423 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 424 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 425 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 426 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 2 | -2 | | |
| 427 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 428 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 429 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 430 | GURU PERTAMA | | | | | 11 | 22 | -11 | | |
| 431 | GURU MUDA | | | | | 6 | 6 | 0 | | |
| 432 | GURU MADYA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 433 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 434 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 435 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN I SEBATIK TENGAH | | | | | | | | | |
| 436 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 437 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 438 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 439 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 440 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 441 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 442 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 443 | GURU PERTAMA | | | | | 11 | | 15 | -4 | |
| 444 | GURU MUDA | | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 445 | GURU MADYA | | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 446 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 447 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 448 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| | SMKN 1 SEMBAKUNG ATULAI | | | | | | | | | |
| 449 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 450 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 451 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 452 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 453 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 454 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 455 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 456 | GURU PERTAMA | | | | | 5 | | 7 | -2 | |
| 457 | GURU MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 458 | GURU MADYA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 459 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 460 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 461 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 2 NUNNUKAN SELATAN | | | | | | | | | |
| 462 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 463 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 464 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 465 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 466 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 467 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 468 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 469 | GURU PERTAMA | | | | | 6 | | 11 | -5 | |
| 470 | GURU MUDA | | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 471 | GURU MADYA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 472 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 473 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 474 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| | SMAN 1 SEBATIK | | | | | | | | | |
| 475 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 476 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 477 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 478 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 479 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 480 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 481 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 482 | GURU PERTAMA | | | | | 11 | | 19 | -8 | |
| 483 | GURU MUDA | | | | | 12 | | 12 | 0 | |
| 484 | GURU MADYA | | | | | 6 | | 6 | 0 | |
| 485 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 486 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 487 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 1 MALINAU | | | | | | | | | |
| 488 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 489 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 490 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | 4 | -3 | | |
| 491 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 4 | -4 | | |
| 492 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 493 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 494 | PENGELOLA DATA | | | | 1 | | 4 | -3 | | |
| 495 | GURU PERTAMA | | | | | 10 | 23 | -13 | | |
| 496 | GURU MUDA | | | | | 5 | 5 | 0 | | |
| 497 | GURU MADYA | | | | | 15 | 15 | 0 | | |
| 498 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 499 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 500 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMAN 2 MALINAU | | | | | | | | | |
| 501 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 502 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 503 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 504 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 505 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 506 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 507 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 508 | GURU PERTAMA | | | | | 10 | 15 | -5 | | |
| 509 | GURU MUDA | | | | | 4 | 4 | 0 | | |
| 510 | GURU MADYA | | | | | 1 | 0 | 1 | | |
| 511 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 512 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 513 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 3 MALINAU | | | | | | | | | |
| 514 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 515 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 516 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 517 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 4 | -4 | | |
| 518 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 519 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 520 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 521 | GURU PERTAMA | | | | | 14 | 16 | -2 | | |
| 522 | GURU MUDA | | | | | 10 | 9 | 1 | | |
| 523 | GURU MADYA | | | | | 5 | 5 | 0 | | |
| 524 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 525 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 526 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMAN 4 MALINAU | | | | | | | | | |
| 527 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 528 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 529 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 530 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 531 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 532 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 533 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 534 | GURU PERTAMA | | | | | 7 | 15 | -8 | | |
| 535 | GURU MUDA | | | | | 10 | 10 | 0 | | |
| 536 | GURU MADYA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 537 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 538 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 539 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 5 MALINAU | | | | | | | | | |
| 540 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 541 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 542 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 543 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 544 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 545 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 546 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 547 | GURU PERTAMA | | | | | 5 | 12 | -7 | | |
| 548 | GURU MUDA | | | | | 4 | 4 | 0 | | |
| 549 | GURU MADYA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 550 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 551 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 552 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMAN 6 MALINAU | | | | | | | | | |
| 553 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 554 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 555 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 556 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 557 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 558 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 559 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 560 | GURU PERTAMA | | | | | 7 | 17 | -10 | | |
| 561 | GURU MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 562 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 563 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 564 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 565 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 7 MALINAU | | | | | | | | | |
| 566 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 567 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 1 | 0 | |
| 568 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | 1 | -1 | |
| 569 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 570 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | 1 | -1 | |
| 571 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | 1 | -1 | |
| 572 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | 1 | -1 | |
| 573 | GURU PERTAMA | | | | | 10 | 16 | 16 | -6 | |
| 574 | GURU MUDA | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 575 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 576 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 577 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | 2 | -2 | |
| 578 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | 2 | -2 | |
| | SMAN 8 MALINAU | | | | | | | | | |
| 579 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 580 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | 1 | -1 | |
| 581 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 3 | 3 | -3 | |
| 582 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| 583 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 1 | 0 | |
| 584 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 3 | 3 | -3 | |
| 585 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 3 | 3 | -3 | |
| 586 | GURU PERTAMA | | | | | 16 | 24 | 24 | -8 | |
| 587 | GURU MUDA | | | | | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 588 | GURU MADYA | | | | | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 589 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 590 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | 2 | -2 | |
| 591 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | 2 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 9 MALINAU | | | | | | | | | |
| 592 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 593 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 594 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 595 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 596 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 597 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 598 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 599 | GURU PERTAMA | | | | | 10 | | 19 | -9 | |
| 600 | GURU MUDA | | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 601 | GURU MADYA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 602 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 603 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 604 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| | SMAN 10 MALINAU | | | | | | | | | |
| 605 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 606 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 607 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 608 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 609 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 610 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 611 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 612 | GURU PERTAMA | | | | | 9 | | 11 | -2 | |
| 613 | GURU MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 614 | GURU MADYA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 615 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 616 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 617 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PECAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PECAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 11 MALINAU | | | | | | | | | |
| 618 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 619 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 620 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 621 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 622 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 623 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 624 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 625 | GURU PERTAMA | | | | | 12 | | 17 | -5 | |
| 626 | GURU MUDA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 627 | GURU MADYA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 628 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 629 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 630 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| | SMAN 12 MALINAU | | | | | | | | | |
| 631 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 632 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 633 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 634 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 635 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 636 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 637 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 638 | GURU PERTAMA | | | | | 11 | | 0 | 11 | |
| 639 | GURU MUDA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 640 | GURU MADYA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 641 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 642 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 643 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 13 MALINAU | | | | | | | | | |
| 644 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 645 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 646 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 647 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 648 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 649 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 650 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 651 | GURU PERTAMA | | | | | 12 | | 17 | -5 | |
| 652 | GURU MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 653 | GURU MADYA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 654 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 655 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 656 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| | SMAN 14 MALINAU | | | | | | | | | |
| 657 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 658 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 659 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 660 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 661 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 662 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 663 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 664 | GURU PERTAMA | | | | | 9 | | 16 | -7 | |
| 665 | GURU MUDA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 666 | GURU MADYA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 667 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 668 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 669 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 15 MALINAU | | | | | | | | | |
| 670 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 671 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 672 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 673 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 674 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 675 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 676 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 677 | GURU PERTAMA | | | | | 6 | 5 | 1 | | |
| 678 | GURU MUDA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 679 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 680 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 681 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 682 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMAN 16 MALINAU | | | | | | | | | |
| 683 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 684 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 685 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 686 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 687 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 688 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 689 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 690 | GURU PERTAMA | | | | | 6 | 16 | -10 | | |
| 691 | GURU MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 692 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 693 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 694 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 695 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMKN 1 MALINAU | | | | | | | | | |
| 696 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 697 | ANALIS TATA USAHA | | | | 2 | | 1 | 1 | | |
| 698 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 699 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 700 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 701 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 702 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 703 | GURU PERTAMA | | | | | 8 | 19 | -11 | | |
| 704 | GURU MUDA | | | | | 8 | 8 | 0 | | |
| 705 | GURU MADYA | | | | | 4 | 4 | 0 | | |
| 706 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 707 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 708 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMKN 2 MALINAU | | | | | | | | | |
| 709 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 710 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 711 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 712 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 3 | -3 | | |
| 713 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 714 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 715 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 716 | GURU PERTAMA | | | | | 12 | 24 | -12 | | |
| 717 | GURU MUDA | | | | | 16 | 16 | 0 | | |
| 718 | GURU MADYA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 719 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 720 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 721 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMKN 1 SPP MALINAU | | | | | | | | | |
| 722 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 723 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 724 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 725 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 726 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 727 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 728 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 729 | GURU PERTAMA | | | | | 13 | | 24 | -11 | |
| 730 | GURU MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 731 | GURU MADYA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 732 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 733 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 734 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| | SMAN 1 TERPADU UNGGULAN KTT | | | | | | | | | |
| 735 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 736 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 737 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 738 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 739 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 2 | | | 1 | 1 | |
| 740 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 741 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 742 | GURU PERTAMA | | | | | 12 | | 18 | -6 | |
| 743 | GURU MUDA | | | | | 17 | | 17 | 0 | |
| 744 | GURU MADYA | | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 745 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 746 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 747 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 1 TANAN TIDUNG | | | | | | | | | |
| 748 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 749 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 750 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 751 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 752 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 753 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 754 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 755 | GURU PERTAMA | | | | | 6 | | 10 | -4 | |
| 756 | GURU MUDA | | | | | 14 | | 14 | 0 | |
| 757 | GURU MADYA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 758 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 759 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 760 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| | SMAN 2 TANAN TIDUNG | | | | | | | | | |
| 761 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 762 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 763 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 764 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 765 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 766 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 767 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 768 | GURU PERTAMA | | | | | 5 | | 9 | -4 | |
| 769 | GURU MUDA | | | | | 12 | | 12 | 0 | |
| 770 | GURU MADYA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 771 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 772 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 773 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMKN 1 TANPA TIDUNG | | | | | | | | | |
| 774 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 775 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 776 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 777 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 778 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 779 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 780 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 781 | GURU PERTAMA | | | | | 2 | 6 | -4 | | |
| 782 | GURU MUDA | | | | | 6 | 6 | 0 | | |
| 783 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 784 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 785 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 786 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SLBN TANPA TIDUNG | | | | | | | | | |
| 787 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 788 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 789 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 790 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 791 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 792 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 793 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 794 | GURU PERTAMA | | | | | 2 | 33 | -31 | | |
| 795 | GURU MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 796 | GURU MADYA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 797 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 798 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 799 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 800 | PENGENMUDI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SLBN MALINAU | | | | | | | | | |
| 801 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 802 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 803 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 804 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 805 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 806 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 807 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 808 | GURU PERTAMA | | | | | 9 | | 48 | -39 | |
| 809 | GURU MUDA | | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 810 | GURU MADYA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 811 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 812 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 813 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 814 | PENGENMUDI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| | SMAN 1 TANJUNGSALOR | | | | | | | | | |
| 815 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 816 | ANALIS TATA USAHA | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 817 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 818 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | | 4 | -4 | |
| 819 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 820 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 821 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 4 | -4 | |
| 822 | GURU PERTAMA | | | | | 20 | | 30 | -10 | |
| 823 | GURU MUDA | | | | | 9 | | 9 | 0 | |
| 824 | GURU MADYA | | | | | 12 | | 12 | 0 | |
| 825 | GURU UTAMA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 826 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 827 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 2 TANJUNG SELOR | | | | | | | | | |
| 828 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 829 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 830 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 831 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 832 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 833 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 834 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 835 | GURU PERTAMA | | | | | 5 | 7 | -2 | | |
| 836 | GURU MUDA | | | | | 8 | 8 | 0 | | |
| 837 | GURU MADYA | | | | | 3 | 4 | -1 | | |
| 838 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 839 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 840 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMAN 1 SEKATAP | | | | | | | | | |
| 841 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 842 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 843 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 844 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 845 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 846 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 847 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 848 | GURU PERTAMA | | | | | 7 | 12 | -5 | | |
| 849 | GURU MUDA | | | | | 7 | 7 | 0 | | |
| 850 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 851 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 852 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 853 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 1 TANJUNGPALAS BARAT | | | | | | | | | |
| 854 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 855 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 856 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 857 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 858 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 859 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 860 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 861 | GURU PERTAMA | | | | | 13 | 19 | -6 | | |
| 862 | GURU MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 863 | GURU MADYA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 864 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 865 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 866 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMAN 1 TANJUNGPALAS TIMUR | | | | | | | | | |
| 867 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 868 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 869 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 870 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 871 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 872 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 873 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 874 | GURU PERTAMA | | | | | 7 | 10 | -3 | | |
| 875 | GURU MUDA | | | | | 4 | 4 | 0 | | |
| 876 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 877 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 878 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 879 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PECAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PECAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 1 TANJUNG PALAS UTARA | | | | | | | | | |
| 880 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 881 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 882 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 883 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 884 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 885 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 886 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 887 | GURU PERTAMA | | | | | 7 | 10 | -3 | | |
| 888 | GURU MUDA | | | | | 10 | 10 | 0 | | |
| 889 | GURU MADYA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 890 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 891 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 892 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMAN 1 PESO | | | | | | | | | |
| 893 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 894 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 895 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 896 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 897 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 898 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 899 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 900 | GURU PERTAMA | | | | | 11 | 17 | -6 | | |
| 901 | GURU MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 902 | GURU MADYA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 903 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 904 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 905 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PECAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PECAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 1 TANJUNG PALAS | | | | | | | | | |
| 906 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 907 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 908 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 909 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 3 | -3 | | |
| 910 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 2 | | 1 | 1 | | |
| 911 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 912 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 913 | GURU PERTAMA | | | | | 11 | 21 | -10 | | |
| 914 | GURU MUDA | | | | | 11 | 11 | 0 | | |
| 915 | GURU MADYA | | | | | 11 | 11 | 0 | | |
| 916 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 917 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 918 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMKN 1 TANJUNG PALAS | | | | | | | | | |
| 919 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 920 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 921 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 922 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 923 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 924 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 925 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 926 | GURU PERTAMA | | | | | 7 | 18 | -11 | | |
| 927 | GURU MUDA | | | | | 5 | 5 | 0 | | |
| 928 | GURU MADYA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 929 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 930 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 931 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMKN 1 TANJUNG PALAS UTARA | | | | | | | | | |
| 932 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 933 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 934 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 935 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 936 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 937 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 938 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 939 | GURU PERTAMA | | | | | 13 | 20 | -7 | | |
| 940 | GURU MUDA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 941 | GURU MADYA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 942 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 943 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 944 | PRAMU KERBERSIHAN SMKN 1 TANJUNG SELOR | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 945 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 946 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 947 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 948 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 4 | -4 | | |
| 949 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 4 | | 1 | 3 | | |
| 950 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 951 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 952 | GURU PERTAMA | | | | | 8 | 17 | -9 | | |
| 953 | GURU MUDA | | | | | 15 | 14 | 1 | | |
| 954 | GURU MADYA | | | | | 14 | 14 | 0 | | |
| 955 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 956 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 957 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMKN 2 TANJUNGG SELOR | | | | | | | | | |
| 958 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 959 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 960 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 961 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 3 | -3 | | |
| 962 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 963 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 964 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 965 | GURU PERTAMA | | | | | 4 | 19 | -15 | | |
| 966 | GURU MUDA | | | | | 17 | 17 | 0 | | |
| 967 | GURU MADYA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 968 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 969 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 970 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMKN 3 TANJUNGG SELOR | | | | | | | | | |
| 971 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 972 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 973 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 974 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 3 | -3 | | |
| 975 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 976 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 977 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 978 | GURU PERTAMA | | | | | 15 | 31 | -16 | | |
| 979 | GURU MUDA | | | | | 16 | 16 | 0 | | |
| 980 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 981 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 982 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 983 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMAN 1 TANJUNGPALAS TENGAH | | | | | | | | | |
| 984 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 985 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 986 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 987 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 988 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 989 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 990 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 991 | GURU PERTAMA | | | | | 3 | 29 | -26 | | |
| 992 | GURU MUDA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 993 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 994 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 995 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 996 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SMAN 1 BUNYU | | | | | | | | | |
| 997 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 998 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 999 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 1000 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 2 | -2 | | |
| 1001 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 3 | | 1 | 2 | | |
| 1002 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 1003 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 1004 | GURU PERTAMA | | | | | 10 | 16 | -6 | | |
| 1005 | GURU MUDA | | | | | 10 | 10 | 0 | | |
| 1006 | GURU MADYA | | | | | 5 | 5 | 0 | | |
| 1007 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1008 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 1009 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| | SMKN 1 BUNYU | | | | | | | | | |
| 1010 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 1011 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 1012 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 1013 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 1014 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 1015 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 1016 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 1017 | GURU PERTAMA | | | | | 12 | 22 | -10 | | |
| 1018 | GURU MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 1019 | GURU MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 1020 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1021 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 1022 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | SLBN BULUNGAN | | | | | | | | | |
| 1023 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 1024 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 1025 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 1026 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 1027 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 1028 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 1029 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 1030 | GURU PERTAMA | | | | | 10 | 34 | -24 | | |
| 1031 | GURU MUDA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1032 | GURU MADYA | | | | | 5 | 5 | 0 | | |
| 1033 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 1034 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 1035 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 1036 | PENGENMUDI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| | SMKN 1 TANJUNG PALAS TIMUR | | | | | | | | |
| 1037 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 1038 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 1039 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 1040 | PUSTAKAWAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 1041 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 1042 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 1043 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 1044 | GURU PERTAMA | | | | | 0 | 6 | -6 | |
| 1045 | GURU MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 1046 | GURU MADYA | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1047 | GURU UTAMA | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1048 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 1049 | PRAMU KERBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| | JUMLAH | 1 | 10 | 16 | 126 | 1472 | 3393 | -1768 | |

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 DINAS KESEHATAN

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 1 | KEPALA DINAS KESEHATAN | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PERTAMA | | | | | 1 | 4 | -3 | |
| 4 | EPIDEMIOLOG KESEHATAN PERTAMA | | | | | 1 | 2 | -1 | |
| 5 | PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | SANTARIAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 7 | ADMINISTRATOR KESEHATAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 8 | PRANATA LABORATORIUM PELAKSANA LANJUTAN | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 9 | TEKNISI ELEKTROMEDIS PELAKSANA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 10 | PRANATA LABORATORIUM PELAKSANA | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 12 | PERENCANA AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | BENDAHARA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 14 | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 15 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 16 | ANALIS KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 17 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 18 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 19 | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 20 | VERFIKATOR ANGGARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 21 | VERFIKATOR KEUANGAN | | | | 0 | | 3 | -3 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 22 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 23 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 24 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 25 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 26 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 27 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 28 | PENGELOLA SURAT | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 29 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 30 | OPERATOR SPEEDBOAT | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 31 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 32 | KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 33 | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 34 | ANALIS KESEHATAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 35 | ANALIS OBAT DAN MAKANAN | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 36 | PENYULUH OBAT DAN MAKANAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 37 | PENGELOLA KEFARMASIAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 38 | PENGELOLA OBAT DAN ALAT - ALAT KESEHATAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 39 | KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 40 | ANALIS KESEHATAN | | | | 4 | | | 4 | 0 | |
| 41 | ANALIS PEMBAYARAN JAMINAN KESEHATAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 42 | PENGELOLA RUJUKAN KESEHATAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 43 | PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 44 | PENGELOLA KEPERAWATAN | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 45 | KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 46 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 47 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 48 | PENGELOLA PROFESI SDM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 49 | PENGADMINISTRASI PELATIHAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 50 | KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 51 | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 52 | ANALIS PELAYANAN PUBLIK | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 53 | PENGELOLA PENGGERAK PERAN SERTA MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN | | | | 0 | | 4 | -4 | | |
| 54 | KEPALA SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 55 | ANALIS KESEHATAN IBU DAN ANAK | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 56 | ANALIS GIZI | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 57 | PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN KELUARGA | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 58 | PENGELOLA URUSAN KESEHATAN MASYARAKAT | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 59 | PENGELOLA PROGRAM GIZI | | | | 0 | | 3 | -3 | | |
| 60 | KEPALA SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 61 | ANALIS KESEHATAN KERJA | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 62 | ANALIS OBAT DAN MAKANAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 63 | PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 64 | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 65 | ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 66 | ANALIS KESEHATAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 67 | PENGELOLA PROGRAM IMUNISASI | | | | 1 | | 2 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 68 | KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 69 | ANALIS PENYAKIT MENULAR | | | | 3 | | | 3 | 0 | |
| 70 | PENGELOLA PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 71 | KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 72 | ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 73 | PENGELOLA PENYAKIT TIDAK MENULAR | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 74 | KEPALA UPTD. INSTALASI FARMASI KESEHATAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 75 | APOTEKER PERTAMA | | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 76 | ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 77 | ASISTEN APOTEKER PELAKSANA | | | | | 0 | | 4 | -4 | |
| 78 | TEKNISI ELEKTROMEDIS PELAKSANA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 79 | KEPALA TATA USAHA UPTD. INSTALASI FARMASI | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 80 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 81 | ANALIS SISTEM INFORMASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 82 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 83 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 84 | PENGELOLA SURAT | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 85 | PENGADMINISTRASI GUDANG FARMASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 86 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 87 | PENGEEMUDI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 88 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 89 | PRAMU TAMAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 4 | 9 | 33 | 11 | 128 | -70 | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah, Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Bureauplikum

LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 1 | | | | | 1 | 0 | | |
| 2 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 3 | PERENCANA AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 4 | ANALIS PEMBANGUNAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 5 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 6 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 7 | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | | | 1 | 1 | | 2 | -1 | | |
| 8 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 9 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 10 | BENDAHARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 11 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 12 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 13 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 14 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 3 | -2 | | |
| 15 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 16 | PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 17 | ANALIS SISTEM INFORMASI | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 18 | PENGELOLA GUDANG | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 19 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 3 | | 5 | -2 | | |
| 20 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 21 | OPERATOR SPEEDBOAT | | | | 2 | | 2 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 22 | PENGADMINISTRASI PERSURATAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 23 | PENGENMUDI | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 24 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 25 | KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 26 | TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 27 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 28 | PENGAWAS IRIGASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 29 | PENGAMAT OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 30 | PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 31 | PENJAGA PINTU AIR | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 32 | KEPALA SEKSI IRIGASI, SUNGAI DAN AIR RAWA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 33 | PEMERIKSA IRIGASI | | | | 3 | | 3 | 0 | | |
| 34 | ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 35 | PENGELOLA PENGAIRAN | | | | 1 | | 3 | -2 | | |
| 36 | PENGELOLA SUMBER DAYA AIR | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 37 | PRANATA DAERAH ALIRAN SUNGAI | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 38 | KEPALA SEKSI PANTAI DAN AIR BAKU | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 39 | ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 40 | ANALIS SUMBER DAYA AIR | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 41 | ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 42 | TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA | | | | | | | 0 | | |
| 43 | KEPALA BIDANG BINA MARGA | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 44 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 45 | ANALIS JALAN JEMBATAN | | | | 2 | | 3 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 46 | ANALIS SISTEM JARINGAN JALAN JEMBATAN | | | | 2 | | 3 | -1 | | |
| 47 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 48 | KEPALA SEKSI JALAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 49 | PENELAHAH PENGELOLAAN LEGER JALAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 50 | PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN | | | | 2 | | 3 | -1 | | |
| 51 | PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 52 | PEMELIHARA JALAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 53 | KEPALA SEKSI JEMBATAN DAN BANGUNAN PELENGKAP | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 54 | PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 55 | ANALIS JALAN JEMBATAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 56 | PENGELOLA PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN | | | | 0 | | 3 | -3 | | |
| 57 | KEPALA BIDANG CIPTA KARYA | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 58 | TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 59 | ANALIS PENATAAN KAWASAN | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 60 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 61 | ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 62 | KEPALA SEKSI PENATAAN BANGUNAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 63 | PENATA BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 64 | PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | | | | 1 | | 3 | -2 | | |
| 65 | PENGELOLA PERENCANAAN TEKNIS TATA BANGUNAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 66 | PEMELIHARA BANGUNAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 67 | KEPALA SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN, SANITASI DAN AIR MINUM | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 68 | ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | | | | 1 | | 2 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 69 | PENELAAH PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN PEMERIKSA SANITASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 70 | | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 71 | KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 72 | PENATA RUANG AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 73 | ANALIS PERTANAHAN | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 74 | ANALIS PETA WILAYAH | | | | 1 | | 3 | -2 | | |
| 75 | PENGELOLA GEOSPASIAL | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 76 | TEKNISI PEMETAAN DAN PENGAMBARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 77 | KEPALA SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 78 | ANALIS TATA RUANG | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 79 | PENYUSUN RENCANA TATA RUANG | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 80 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 81 | PENGELOLA GEOSPASIAL | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 82 | TEKNISI PEMETAAN DAN PENGAMBARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 83 | PENGELOLA BATAS WILAYAH RUPABUMI DAN PATEN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 84 | KEPALA SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 85 | ANALIS PEMANFAATAN RUANG | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 86 | PENGAWAS PERBATASAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 87 | TEKNISI PEMETAAN DAN PENGAMBARAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 88 | PENGELOLA GEOSPASIAL | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 89 | KEPALA BIDANG PERUMAHAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 90 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 91 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 92 | ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN | | | | 2 | | 3 | -1 | | |
| 93 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 3 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 94 | ANALIS PERUMAHAN | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 95 | PENGAWAS FISIK PEMUKIMAN | | | | 1 | | | 3 | -2 | |
| 96 | ANALIS BANGUNAN DAN PERUMAHAN | | | | 4 | | | 4 | 0 | |
| 97 | PENGAWAS TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN | | | | 2 | | | 4 | -2 | |
| 98 | PENATA GAMBAR | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 99 | PENGELOLA RENCANA PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 100 | PENGELOLA RENCANA PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 101 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 102 | JURU SURVEI PERMUKIMAN PERUMAHAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 103 | KEPALA BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 104 | PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 105 | PENGUJI BAHAN DAN BANGUNAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 106 | PENGUJI LABORATORIUM TANAH ASPAL DAN BETON | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 107 | PENELAHAH MUTU KONSTRUKSI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 108 | PENGELOLA JASA KONSTRUKSI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 109 | KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA JASA KONSTRUKSI | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 110 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 111 | PENELAHAH MUTU KONSTRUKSI | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 112 | ANALIS TEKNIK DAN MATERI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 113 | PENGELOLA JASA KONSTRUKSI | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 114 | KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 115 | ANALIS TEKNIK DAN MATERI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 116 | PENELAHAH MUTU KONSTRUKSI | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 117 | PENGELOLA TEKNIK KONSTRUKSI BERKELANJUTAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 118 | PENGELOLA JASA KONSTRUKSI | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| | JUMLAH | 1 | 7 | 12 | 71 | 9 | 189 | -89 | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Bidang Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN VII
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|---------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI 1 | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | | | | | | 1 | 0 | | |
| 2 | POLISI PAMONG PRAJA MUDA | | | | | 0 | 2 | -2 | | |
| 3 | POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA | | | | | 8 | 4 | -4 | | |
| 4 | POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA LANJUTAN | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 5 | POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA | | | | | 0 | 4 | -4 | | |
| 6 | POLISI PAMONG PRAJA PELAKSANA PEMULA | | | | | 0 | 48 | -48 | | |
| 7 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 8 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 9 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 10 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 11 | BENDAHARA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 12 | ANALIS KERJASAMA TEKNIS STANDARISASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 13 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 14 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 15 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 16 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 17 | ANALIS DATA DAN INFOMASI | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 18 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 19 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 20 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 21 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 2 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 22 | OPERATOR SPEEDBOAT | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 23 | KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 24 | KEPALA SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 25 | PENGENDALI TEKNIS KEAMANAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 26 | PENYUSUN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 27 | PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KETERTIBAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 28 | PENGELOLA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 29 | PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 30 | KEPALA SEKSI KETERTIBAN UMUM | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 31 | PENATA TEKNIS PENGAMANAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 32 | PENYUSUN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 33 | PENGOLAH DATA SATUAN PENGAWAS INTERNAL | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 34 | KEPALA BIDANG PENEKAKAN PERATURAN DAERAH | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 35 | KEPALA SEKSI PENEKAKAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 36 | PENYUSUN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 37 | PENGELOLA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 38 | KEPALA SEKSI PENEKAKAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 39 | ANALIS KERJASAMA APARAT PENEKAK HUKUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 40 | PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 41 | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 42 | KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | 1 | | | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 43 | ANALIS BIMBINGAN PELAYANAN DAN KONSULTASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 44 | ANALIS PERLINDUNGAN MASYARAKAT PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 0 | -1 | | |
| 45 | KEPALA SEKSI PEMADAM KEBAKARAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 47 | ANALIS KEBAKARAN | | | | 0 | | 0 | -1 | | |
| 48 | PRANATA PEMADAM KEBAKARAN | | | | 0 | | 0 | -7 | | |
| | JUMLAH | 1 | 4 | 8 | 15 | 8 | 113 | -77 | | |

GOVERNOR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 DINAS SOSIAL

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS SOSIAL | 1 | | | | | 1 | 0 | | |
| 2 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 3 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 4 | BENDAHARA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 5 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 6 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -4 | | |
| 7 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | -1 | | |
| 8 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 9 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 10 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | 1 | 0 | | |
| 11 | PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN | | | | 1 | | 1 | -2 | | |
| 12 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 13 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 14 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 15 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 2 | 0 | | |
| 16 | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 17 | PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | -1 | | |
| 18 | ANALIS BENCANA | | | | 4 | | 4 | -1 | | |
| 19 | ANALIS JAMINAN SOSIAL | | | | 2 | | 2 | -2 | | |
| 20 | PENGELOLA LOGISTIK | | | | 0 | | 4 | 0 | | |
| 21 | PENGELOLA DATA BANTUAN SOSIAL | | | | 0 | | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|----|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 22 | KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL | | 1 | | | | 1 | -3 | | |
| 23 | PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | -1 | | |
| 24 | ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL | | | | 4 | | 4 | 0 | | |
| 25 | PENGELOLA REHABILITASI SOSIAL | | | | 0 | | 2 | 0 | | |
| 26 | KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 27 | ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL | | | | 2 | | 2 | -5 | | |
| 28 | PENGELOLA REHABILITASI SOSIAL | | | | 0 | | 1 | 0 | | |
| 29 | KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 30 | PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | -1 | | |
| 31 | ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL | | | | 3 | | 4 | 0 | | |
| 32 | PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 33 | PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL | | | | 0 | | 2 | -1 | | |
| 34 | KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 35 | PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 36 | PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL | | | | 0 | | 3 | 0 | | |
| 37 | ANALIS MASALAH SOSIAL | | | | 3 | | 4 | 0 | | |
| 38 | KEPALA UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA MARGA RAHAYU | | 1 | | | | 1 | -1 | | |
| 39 | NUTRISIONIS PERTAMA | | | | | 1 | 1 | -1 | | |
| 40 | PERAWAT PELAKSANA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 41 | PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA | | | | | 0 | 5 | 0 | | |
| 42 | KEPALA SEKSI PENYANTUNAN DAN PELAYANAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 43 | ANALIS PELAYANAN SOSIAL | | | | 2 | | 2 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 44 | PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN LANSIA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 45 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 46 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | 0 | | |
| 47 | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM | | | | 0 | | 1 | 0 | | |
| 48 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 2 | | 2 | -1 | | |
| 49 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 50 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 51 | KEPALA SEKSI PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENYALURAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 52 | PENGELOLA PENYALURAN DAN PENEMPATAN KERJA, PENYANDANG CACAT DAN LANSIA | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 53 | PENGELOLA PEMBINAAN DAN BANTUAN | | | | 0 | | 1 | -2 | | |
| | JUMLAH | 1 | 6 | 6 | 32 | 15 | 91 | -31 | | |

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN IX
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | SEKRETARIS | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 3 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 4 | ANALIS PENGELOLA KEUANGAN | | | | 2 | | | 1 | 1 | |
| 5 | BENDAHARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 6 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 7 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 8 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 2 | | | 1 | 1 | |
| 9 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 10 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 11 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 12 | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 13 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 14 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 15 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 16 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 17 | PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 18 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 4 | | | 2 | 2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 19 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 20 | PENGADMINISTRASI DATA PENYADIAN DAN PUBLIKASI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 21 | PENGADMINISTRASI PERSURATAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 22 | PENJAGA KEAMANAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 23 | PENGENMUDI | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 24 | KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 25 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 26 | ANALIS PEREKONOMIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 27 | ANALIS MASALAH SOSIAL | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 28 | ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 29 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 30 | PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 31 | PENGELOLA PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 32 | KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 33 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 34 | ANALIS PEMBELAJARAN PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 35 | ANALIS HUKUM | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 36 | ANALIS SISTEM INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 37 | ANALIS KESEHATAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 38 | ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 39 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 40 | PENGELOLA PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KEBUDAYAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 41 | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK | | 1 | | | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 42 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 43 | ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 44 | ANALIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 45 | ANALIS HUKUM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 46 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 47 | ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 48 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 3 | -3 | | |
| 49 | PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 50 | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 51 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 52 | ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 53 | ANALIS ADVOKASI DAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 54 | ANALIS SARANA PROGRAM KELUARGA BERENCANA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 55 | ANALIS PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 56 | ANALIS KELUARGA BERENCANA | | | | 2 | | 1 | 1 | | |
| 57 | ANALIS KETAHANAN KELUARGA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 58 | ANALIS KESEJAHTERAAN KELUARGA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 59 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 3 | -3 | | |
| 60 | PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 61 | KEPALA UPTD PERLINDUNGAN DAN ANAK | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 62 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | JABATAN FUNGSIONAL | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 63 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 64 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 65 | KEPALA SEKSI PENGADUAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 66 | KONSELOR | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 67 | PENJAGA ASRAMA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 68 | KEPALA SEKSI TINDAK LANJUT | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 69 | KONSELOR | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 70 | KOMEDIATOR | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| | JUMLAH | 1 | 6 | 5 | 27 | 13 | 89 | -37 | | |

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PECAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PECAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAJAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 1 | KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | PENGAWAS BENIH TANAMAN AHIL MADYA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 3 | PENGAWAS BENIH TANAMAN AHIL MUDA | | | | | 0 | 5 | -5 | |
| 4 | PENGAWAS BENIH TANAMAN AHIL PERTAMA | | | | | 2 | 6 | -4 | |
| 5 | PENGAWAS BENIH TANAMAN PENYELIA | | | | | 0 | 4 | -4 | |
| 6 | PENGAWAS BENIH TANAMAN PELAKSANA LANJUTAN | | | | | 0 | 4 | -4 | |
| 7 | PENGAWAS BENIH TANAMAN PELAKSANA | | | | | 0 | 4 | -4 | |
| 8 | PENGAWAS BENIH TANAMAN PELAKSANA PEMULA | | | | | 0 | 4 | -4 | |
| 9 | PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN AHIL MADYA | | | | | 0 | 4 | -4 | |
| 10 | PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN AHIL MUDA | | | | | 0 | 8 | -8 | |
| 11 | PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN AHIL PERTAMA | | | | | 5 | 12 | -7 | |
| 12 | PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN PENYELIA | | | | | 0 | 3 | -3 | |
| 13 | PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN PELAKSANA LANJUTAN | | | | | 0 | 3 | -3 | |
| 14 | PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN PELAKSANA | | | | | 0 | 6 | -6 | |
| 15 | PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN PELAKSANA PEMULA | | | | | 0 | 6 | -6 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEKAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEKAWAI BERDASARKAN ABK | | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|----|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEKAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 16 | PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MADYA | | | | | 0 | 3 | -3 | | |
| 17 | PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI MUDA | | | | | 0 | 4 | -4 | | |
| 18 | PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA | | | | | 2 | 4 | -2 | | |
| 19 | PENGAWAS BIBIT TERNAK PENYELIA | | | | | 0 | 3 | -3 | | |
| 20 | PENGAWAS BIBIT TERNAK PELAKSANA LANJUTAN | | | | | 0 | 3 | -3 | | |
| 21 | PENGAWAS BIBIT TERNAK PELAKSANA | | | | | 0 | 4 | -4 | | |
| 22 | PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MADYA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 23 | PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI MUDA | | | | | 0 | 2 | -2 | | |
| 24 | PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 25 | PENGAWAS MUTU PAKAN PELAKSANA PEMULA | | | | | 0 | 2 | -2 | | |
| 26 | MEDIK VETERINER AHLI MADYA | | | | | 0 | 2 | -2 | | |
| 27 | MEDIK VETERINER AHLI MUDA | | | | | 0 | 3 | -3 | | |
| 28 | MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA | | | | | 2 | 3 | -1 | | |
| 29 | PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA LANJUTAN | | | | | 0 | 4 | -4 | | |
| 30 | PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA | | | | | 0 | 4 | -4 | | |
| 31 | PARAMEDIK VETERINER PEMULA | | | | | 0 | 5 | -5 | | |
| 32 | PENYULUH PERTANIAN AHLI MADYA | | | | | 0 | 3 | -3 | | |
| 33 | PENYULUH PERTANIAN AHLI MUDA | | | | | 0 | 3 | -3 | | |
| 34 | PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA | | | | | 7 | 7 | 0 | | |
| 35 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MADYA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 36 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 37 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------------------|----|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | | |
| 38 | ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MADYA | | | | | 0 | 1 | 1 | -1 | | |
| 39 | ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | 1 | -1 | | |
| 40 | ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA | | | | | 2 | 2 | 2 | 0 | | |
| 41 | PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN MADYA | | | | | 0 | 1 | 1 | -1 | | |
| 42 | PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN MUDA | | | | | 0 | 1 | 1 | -1 | | |
| 43 | PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN PERTAMA | | | | | 0 | 1 | 1 | -1 | | |
| 44 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MADYA | | | | | 0 | 1 | 1 | -1 | | |
| 45 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | 1 | -1 | | |
| 46 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA | | | | | 0 | 1 | 1 | -1 | | |
| 47 | ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN PELAKSANA | | | | | 0 | 2 | 2 | -2 | | |
| 48 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 49 | PERENCANA AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 1 | -1 | | |
| 50 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 1 | -2 | | |
| 51 | ANALIS SISTEM INFORMASI | | | | | 0 | 2 | 2 | -1 | | |
| 52 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | | 1 | 1 | 1 | -1 | | |
| 53 | ANALIS PERENCANAAN | | | | | 0 | 1 | 1 | -2 | | |
| 54 | BENDAHARA | | | | | 1 | 1 | 1 | -1 | | |
| 55 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | | 1 | 1 | 1 | -1 | | |
| 56 | PENATA LAPORAN KEUANGAN | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| 57 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN | | | | | 0 | 5 | 5 | -1 | | |
| 58 | PENGELOLA GAJI | | | | | 0 | 1 | 1 | -1 | | |
| 59 | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM | | | | | 1 | 1 | 1 | -1 | | |
| 60 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | | 0 | 1 | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEKAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEKAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 61 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | 1 | -1 | |
| 62 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | -1 | |
| 63 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 2 | 0 | |
| 64 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | 0 | |
| 65 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 66 | PENGADMINISTRASI PERSURATAN | | | | 0 | | 1 | -2 | |
| 67 | PENGEMUDI | | | | 0 | | 1 | 0 | |
| 68 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 3 | -1 | |
| 69 | KEPALA UPTD LABORATORIUM KESWAN DAN KESMAVET | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 70 | PENGAWAS SANTIASI USAHA PETERNAKAN, DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | 1 | | 2 | 0 | |
| 71 | PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN | | | | 0 | | 2 | 0 | |
| 72 | MEDIK VETERINER AHLI MUDA | | | | 0 | | 1 | -5 | |
| 73 | MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA | | | | | 1 | 2 | -1 | |
| 74 | PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA LANJUTAN | | | | 0 | | 2 | 0 | |
| 75 | PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 76 | PARAMEDIK VETERINER PEMULA | | | | 0 | | 1 | 0 | |
| 77 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 78 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -2 | |
| 79 | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 80 | BENDAHARA | | | | 0 | | 1 | 0 | |
| 81 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 82 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEKAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEKAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 83 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 1 | -3 | |
| 84 | KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 85 | PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 86 | PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 87 | PENELAHAH DATA SERTIFIKASI MUTU BENIH / BIBIT | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 88 | PENELAHAH DATA SUMBER BENIH | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 89 | ANALIS INFORMASI HASIL PERTANIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 90 | PENATA DOKUMEN HASIL PRODUKSI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 91 | ANALIS PENGOLAH HASIL PERTANIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 92 | ANALIS PENINGKATAN USAHA PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 93 | ANALIS INFORMASI PASAR HASIL PERTANIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 94 | ANALIS PENGOLAH HASIL PERTANIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 95 | PENGELOLA KELEMBAGAAN BENIH | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 96 | PENGELOLA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 97 | PENGELOLA TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 98 | KEPALA BIDANG PERKEBUNAN | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 99 | PENGAWAS BENIH TANAMAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 100 | ANALIS PASAR HASIL AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 101 | PENELAHAH DATA SERTIFIKASI MUTU BENIH / BIBIT | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 102 | ANALIS PENGELOLA DATA KOMODITAS PERKEBUNAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 103 | PENYUSUN TEKNIS USAHA BUKTI DAYA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 104 | PENGELOLA PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TANAMAN (OPT) | | | | 0 | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 105 | PENGELOLA PENILAI USAHA PERKEBUNGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 106 | PENGELOLA KELEMBAGAAN BENIH | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 107 | PENGELOLA DATABASE KELEMBAGAAN PETANI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 108 | PENGELOLA DATA PASCA PANEN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 109 | PENGELOLA PASCA PANEN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 110 | PENGELOLA TEKNOLOGI PASCAPANEN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 111 | PENGOLAH DATA SURVEI, PENGUKURAN, DAN PEMETAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 112 | PENGADMINISTRASI SERTIFIKASI PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 113 | KEPALA BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 114 | PENGAWAS BIBIT TERNAH AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 115 | MEDIK VETERINER AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 116 | ANALIS PAKAN TERNAK | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 117 | PENGAWAS MUTU BIBIT TERNAK | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 118 | PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK KECIL DAN UNGGAS | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 119 | PENGAWAS MUTU PAKAN DAN PRODUKSI BIBIT TERNAK BESAR | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 120 | PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 121 | PENGAWAS SANTIASI USAHA PETERNAKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 122 | PENGELOLA BUDIDAYA PENGEMBANGAN TERNAK DAN HEWAN LAINNYA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 123 | PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 124 | PENGELOLA KESEHATAN TERNAK BESAR, KECIL DAN UNGGAS | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 125 | PENGELOLA DATA PASCA PANEN (PETERNAKAN) | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 126 | PENGELOLA KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 127 | KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA | | 1 | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 128 | PENGAWAS ALAT DAN MESIN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 129 | ANALIS LAHAN PERTANIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 130 | PENGAWAS PENGLOLAAN LAHAN PERTANIAN DAN AIR IRIGASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 131 | PEMERIKSA PENGLOLAAN LAHAN PERTANIAN DAN AIR IRIGASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 132 | ANALIS ALAT DAN MESIN PERTANIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 133 | PEMERIKSA PUPUK DAN PESTISIDA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 134 | PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 135 | PEMERIKSA ALAT MESIN PERTANIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 136 | ANALIS PENGEMBANGAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 137 | ANALIS PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 138 | ANALIS PEMBIAYAAN PERTANIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 139 | ANALIS INVESTASI DAERAH | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 140 | PENGOLAH DATA PENGLOLAAN PEMBIAYAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|------|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 158 | PENGELOLA PROGRAM PENYULUHAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 159 | PENGELOLA ADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENYULUH PERTANIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 7 | 3 | 32 | 41 | 280 | -196 | |

GOVERNOR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

titid

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Bidang Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN XI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 1 | KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 3 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | ANALIS PENGELOLAN KEUANGAN | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | BENDAHARA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 8 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 9 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 11 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 13 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 14 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 15 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 16 | KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENATAAN PPLH | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 17 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 19 | ANALIS LINGKUNGAN HIDUP | | | | 2 | | 4 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 20 | PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN PRASARANA WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 21 | PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 22 | ANALIS PENGAMANAN LINGKUNGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 23 | PENGELOLA DOKUMEN MENGENAI ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 24 | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 25 | PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 26 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 27 | ANALIS LINGKUNGAN HIDUP | | | | 3 | | 3 | 0 | | |
| 28 | PENGELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 29 | PENGADMINISTRASI AKREDITASI LINGKUNGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 30 | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 31 | PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 32 | ANALIS ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 33 | ANALIS LINGKUNGAN HIDUP | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 34 | PENGAWAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 35 | PENGELOLA PEMELIHARAAN KONSERVASI LINGKUNGAN DAN KAWASAN KONSERVASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 36 | KEPALA SEKSI KERUSAKAN LINGKUNGAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 37 | ANALIS LINGKUNGAN HIDUP | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 38 | ANALIS KONSERVASI AIR DAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| 39 | KEPALA UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 40 | PENELITIAN PERTAMA | | | | | 0 | 3 | -3 | |
| 41 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD. LABORATORIUM LINGKUNGAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 42 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 43 | ANALIS KIMIA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 44 | PENELITIAN LABORATORIUM | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 45 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 46 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 4 | 4 | 14 | 14 | 57 | -20 | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197601032001121003

LAMPIRAN XII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 1 | | | | | 1 | 0 | | |
| 2 | ADB KEPENDUDUKAN AHLI MADYA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 3 | ADB KEPENDUDUKAN AHLI MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 4 | ADB KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA | | | | | 1 | 2 | -1 | | |
| 5 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 6 | PERENCANA AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 7 | BENDAHARA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 8 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 9 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 10 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 11 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 12 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 13 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 14 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 15 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 16 | KEPALA BIDANG FASILITASI PENCATATAN SIPIL | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 17 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 18 | ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 2 | | 4 | -2 | | |
| 19 | KEPALA BIDANG FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 20 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 21 | ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 1 | | | 4 | -3 | |
| 22 | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 23 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 24 | ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 25 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 26 | PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 4 | 1 | 14 | 8 | | 40 | -12 | |

GOVERNOR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
tttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN XIII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | SEKRETARIS | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 3 | PERENCANA AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 4 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 5 | ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 6 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 7 | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 8 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 9 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 10 | ANALIS JABATAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 11 | PENJAGA KEAMANAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 12 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 13 | PENGADMINISTRASI PERSURATAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 14 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 15 | PENGENMUDI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 16 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 17 | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 18 | BENDAHARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 19 | ANALIS PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 20 | PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 21 | PENGOLAH DAFTAR GAJI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 22 | PENGOLAH DATA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 23 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 24 | PENGADMINISTRASI PAJAK | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 25 | KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 26 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 27 | ANALIS DESA/ KELURAHAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 28 | ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 29 | ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 30 | PENGELOLA KEKAYAAN DESA DAN ADMINISTRASI DESA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 31 | PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DESA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 32 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 33 | PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 34 | KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 35 | PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 36 | ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 37 | ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 38 | ANALIS SOSIAL BUDAYA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 39 | ANALIS KETAHANAN BUDAYA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 40 | PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 41 | KEPALA BIDANG EKONOMI | | 1 | | | | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 42 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 43 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 44 | PENYULUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 45 | ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 46 | PENELAIAH PENGEMBANGAN USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 47 | PENGELOLA DATA PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 48 | PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 49 | KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM, TEKNOLOGI TEPAT GUNA, DAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA | | 1 | | | | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 50 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 51 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 52 | PENYULUH USAHA MANDIRI DAN TTG | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 53 | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 54 | PENYULUH PEMBANGUNAN DAERAH TERPENCIL | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 55 | PENGELOLA KELAYAKAN SUMBER DAYA ALAM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| | JUMLAH | 1 | 5 | 2 | 18 | 9 | 57 | -22 | | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum



LAMPIRAN XIV
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA
DINAS PERHUBUNGAN

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAJAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 1 | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA LANJUTAN | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA PEMULA | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 6 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 7 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 8 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 9 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 10 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 11 | ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 12 | BENDAHARA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 13 | PENGELOLA RENCANA TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 14 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 15 | ANALIS TATA USAHA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 16 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 17 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 18 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 19 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 20 | KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN | | 1 | | | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 21 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | | | | | | 1 | 0 | |
| 22 | KEPALA SEKSI ANGGUTAN DAN TERMINAL | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 23 | ANALIS LALU LINTAS | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 24 | PENYUSUN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN JALAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 25 | ANALIS RENCANA UMUM PEMADUAN MODA TRANSPORTASI DARAT | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 26 | OPERATOR PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 27 | ANALIS ANGGUTAN DARAT | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 28 | PENGAWAS TRANSPORTASI | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 29 | PENGELOLA REKAYASA LALU LINTAS | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 30 | KEPALA SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 31 | ANALIS TEKNIK SURVEI PEMADUAN MODA TRANSPORASI DARAT | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 32 | PENGADMINISTRASI LLAJ | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 33 | PENGELOLA PENGAWASAN LLAJ | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 34 | ANALIS LALU LINTAS | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 35 | ANALIS SISTEM PEMADUAN MODA TRANSPORTASI PERKOTAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 36 | TEKNISI SURVEI LALU LINTAS JALAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 37 | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TRANSPORTASI | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 38 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 39 | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTAR MODA | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 40 | ANALIS ANGGUTAN DARAT | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 41 | PENGELOLA DATA JARINGAN TRANSPORTASI JALAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 42 | PENGELOLA SARANA ANGGUTAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 43 | PENGELOLA KESELAMATAN DAN KEAMANAN KAPAL SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 44 | PENGAWAS TRANSPORTASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 45 | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN MODA DAN KEPERINTISAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 46 | PENGELOLA AUDIT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 47 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 48 | PENGELOLA SARANA ANGKUTAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 49 | ANALIS ANGKUTAN DARAT | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 50 | TEKNISI SURVEI ANGKUTAN JALAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 51 | KEPALA BIDANG PELAYARAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 52 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 53 | KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN ASDP | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 54 | PENGELOLA DATA RANCANG BANGUN SARANA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 55 | PENGELOLA DATA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 56 | ANALIS RENCANA INDUK JARINGAN TRANSPORTASI DARAT | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 57 | ANALIS KESYAHBANDARAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 58 | ANALIS ANGKUTAN LAUT | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 59 | KEPALA SEKSI KEPELABUHANAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 60 | ANALIS PELABUHAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 61 | PENGAWAS KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 62 | PENGAWAS DAN PEMBINA ANGKUTAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 63 | PENGELOLA KESELAMATAN DAN KEAMANAN KAPAL SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 64 | PENGADMINISTRASI KINERJA OPERASIONAL PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 65 | KEPALA UPTD TENGGAYU 1 | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 66 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 67 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 68 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 69 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 70 | KEPALA SEKSI PELAYANAN PELABUHAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 71 | PENGAWAS PELABUHAN | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 72 | OPERATOR TERMINAL | | | | 4 | | 4 | 0 | | |
| 73 | PENGELOLA TERMINAL | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 74 | PENGELOLA PEMERIKSA PERALATAN DAN FASILITAS PELABUHAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 75 | KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN ANGKUTAN PERAIRAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 76 | PEMERIKSA KESELAMATAN PELAYARAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 77 | ANALIS TRANSPORTASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 78 | ANALIS PERIZINAN TRANSPORTASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 79 | PENGAWAS TRANSPORTASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 80 | KEPALA UPTD PLBL LIEM HIE DJUNG | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 81 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 82 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 83 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 84 | KEPALA SEKSI OPERASIONAL PELAYANAN KEPSELABUHANAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 85 | ANALIS PERIZINAN TRANSPORTASI | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 86 | OPERATOR TERMINAL | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 87 | PENGELOLA DATA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 88 | KEPALA SEKSI OPERASIONAL SARANA DAN PRASARANA KESELAMATAN PELAYARAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 89 | PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 90 | PENGELOLA DATA JARINGAN LINTAS TRANSPORTASI SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 91 | PENGAWAS TRANSPORTASI | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 92 | ANALIS TRANSPORTASI | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| | JUMLAH | 1 | 6 | 14 | 73 | 8 | 106 | -4 | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN XV
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK,
DAN PERSANDIAN

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEKAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEKAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | SEKRETARIS | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 3 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 4 | BENDAHARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 5 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 6 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 7 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 8 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 9 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 10 | PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 11 | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 12 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 13 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 14 | PENYULUH KEARSIPAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 15 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 16 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 17 | KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 18 | PRANATA HUMAS AHLI MUDA | | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 19 | ANALIS KONTEN MEDIA SOSIAL | | | | 0 | | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 20 | ANALIS PUBLIKASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 21 | ANALIS BERTITA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 22 | PENGALIH MEDIA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 23 | PENGELOLA PENYELENGGARAAN MEDIA ELEKTRONIK | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 24 | OPERATOR KOMUNIKASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 25 | OPERATOR KOMPUTER GRAFIS | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 26 | PENGOLAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 27 | PENGELOLA DOKUMENTASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 28 | KEPALA BIDANG STATISTIK | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 29 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 30 | ANALIS STATISTIK | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 31 | ANALIS DATA STANDARISASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 32 | PENYULUH STATISTIK | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 33 | PENGELOLA DATA STATISTIK | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 34 | KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 35 | PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA | | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 36 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 3 | | | 3 | 0 | |
| 37 | PENGENDALI TEKNOLOGI INFORMASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 38 | PENGAWAS TEKNOLOGI INFORMASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 39 | PENGENDALI JARINGAN KOMUNIKASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 40 | PENGELOLA STANDAR TEKNOLOGI INFORMASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 41 | PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 42 | PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN | | | | 3 | | | 1 | 2 | |
| 43 | PENGELOLA BAHAN STANDARISASI LAYANAN DAN HARMONISASI PERANGKAT | | | | 1 | | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 44 | PENGELOLA DATABASE | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 45 | KEPALA BIDANG PERSANDIAN DAN KEAMANAN INFORMASI | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 46 | SANDIMAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 47 | MANGGALA INFORMATIKA AHLI MUDA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 48 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 49 | ANALIS PROTEKSI KEAMANAN SIBER | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 50 | ANALIS TATA KELOLA KEAMANAN SIBER | | | | 2 | | 1 | 1 | | |
| 51 | ANALIS PERSANDIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 52 | OPERATOR SANDI DAN TELEKOMUNIKASI | | | | 2 | | 1 | 1 | | |
| 53 | PENGOLAH DATA HASIL PENYENSORAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| | JUMLAH | 1 | 5 | 2 | 27 | 9 | 61 | -17 | | |

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003



LAMPIRAN XVI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 1 | | | | | 1 | 0 | | |
| 2 | PRANATA KOMPUTER PERTAMA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 3 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 4 | PERENCANA MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 5 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 6 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 7 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 8 | BENDAHARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 9 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 10 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 11 | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 12 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 13 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 14 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 15 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 16 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 17 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 18 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 19 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|----|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 20 | KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 21 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 22 | ANALIS PERATURAN INVESTASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 23 | ANALIS PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 24 | PENYUSUN RENCANA INVESTASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 25 | ANALIS KERJASAMA DAN PERMODALAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 26 | PENGOLAH DATA PERATURAN INVESTASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 27 | PENGELOLA KERJASAMA PENANAMAN MODAL | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 28 | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL, DATA DAN SISTEM INFORMASI | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 29 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 30 | PENGAWAS PENANAMAN MODAL | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 31 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 32 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 33 | PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 34 | PENGELOLA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 35 | PENGELOLA DATA PENGEMBANGAN INVESTASI | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 36 | KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 37 | ANALIS KEBIJAKAN MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 38 | ANALIS DOKUMEN PERIZINAN | | | | | 1 | 2 | -1 | | |
| 39 | ANALIS DOKUMEN PERIZINAN | | | | | 1 | 2 | -1 | | |
| 40 | ANALIS HUKUM | | | | | 0 | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 41 | ANALIS DOKUMEN PERIZINAN | | | | | | 1 | 2 | -1 | |
| 42 | PENGADMINISTRASI PERIZINAN | | | | | | 0 | 2 | -2 | |
| 43 | PENGADMINISTRASI PERIZINAN | | | | | | 0 | 2 | -2 | |
| 44 | PENGADMINISTRASI PERIZINAN | | | | | | 0 | 2 | -2 | |
| 45 | KEPALA BIDANG KAJIAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGADUAN LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 46 | ANALIS KEBIJAKSANAAN MUDA | | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | ANALIS HUKUM | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 48 | ANALIS INVESTASI DAERAH | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 49 | KEPALA SEKSI PENANGANAN PENGADUAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 50 | ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT | | | | | | 1 | 2 | -1 | |
| 51 | PENGELOLA DATA LAYANAN PUBLIK DAN HUBUNGAN INVESTOR | | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 5 | 2 | 15 | 16 | 68 | -29 | | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NRP. 197001032001121003



LAMPIRAN XVII
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 1 | KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | PELATIH OLAHRAGA PERTAMA | | | | | 1 | 2 | -1 | |
| 3 | ARSIPARIS PERTAMA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | ARSIPARIS TERAMPIL | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 5 | ASISTEN PELATIH OLAHRAGA PEMULA | | | | | 0 | 4 | -4 | |
| 6 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 7 | PERENCANA AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | ANALIS PERENCANAAN | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | | 1 | 2 | -1 | |
| 12 | BENDAHARA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 13 | PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 14 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 15 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN/PROGRAM | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 17 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 18 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 19 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 22 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | | 1 | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 23 | KEPALA BIDANG PEMUDA | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 24 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 25 | PENYULUH KEPEMUDAAN | | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 26 | PENGELOLA DATA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 27 | PENGADMINISTRASI PELATIHAN | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 28 | KEPALA SEKSI ORGANISASI PEMUDA DAN KEPRAMUKAAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 29 | ANALIS KEPEMUDAAN | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 30 | PENGADMINISTRASI PELATIHAN | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 31 | KEPALA BIDANG OLAHRAGA | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 32 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 33 | ANALIS KEOLAHRAGAAN | | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 34 | PENYULUH OLAHRAGA | | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 35 | PENGELOLA DATA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 | | 48 | -21 | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

tttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003



LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | SEKRETARIS | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 3 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 4 | BENDAHARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 5 | ANALIS PERENCANAAN DAN KERJASAMA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 6 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 7 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 8 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 9 | PENGELOLA LAPORAN KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 10 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 11 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 12 | ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 13 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 14 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 15 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 16 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 17 | PRAMU BAKTI | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 18 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 19 | PENGENMUDI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 20 | KEPALA BIDANG DEPOSIT, PENGEMBANGAN, KOLEKSI, LAYANAN, DAN PELESTARIAN | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 21 | PUSTAKAWAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 22 | PENYUSUN PROMOSI DAN KERJASAMA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 23 | PENGAWAS PERPUSTAKAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 24 | PUSTAKAWAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 25 | PENGELOLA BAHAN PUSTAKA | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 26 | PENGELOLA PERPUSTAKAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 27 | PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 28 | PENGOLAH DATA PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 29 | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 30 | PUSTAKAWAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 31 | PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 32 | PENYUSUN RENCANA KEHUMASAN DAN PERPUSTAKAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 33 | PENGELOLA PERPUSTAKAAN | | | | 4 | | 4 | 0 | |
| 34 | KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 35 | ARSIPARIS AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 36 | ARSIPARIS AHLI PERTAMA | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 37 | PENYULUH KEARSIPAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 38 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 39 | PRANATA RESTORASI ARSIP | | | | 0 | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 40 | PRANATA KEARSIPAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 41 | PENGELOLA ARSIP DAN DOKUMEN HUKUM FREKUENSI RADIO DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 4 | 1 | 21 | 8 | 55 | -20 | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN XIX
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAJAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1 | | | | | 1 | 0 | | |
| 2 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MADYA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 3 | PENGAWAS PERIKANAN MADYA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 4 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN MUDA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 5 | PENGELOLA KESEHATAN IKAN MUDA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 6 | PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR MUDA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 7 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP MUDA | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| 8 | ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN PERTAMA | | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 9 | PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PERTAMA | | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 10 | PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA | | | | | 3 | | 9 | -6 | |
| 11 | PENGELOLA KESEHATAN IKAN PERTAMA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 12 | PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 13 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 14 | SEKRETARIS | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 15 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 16 | BENDAHARA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 17 | ANALIS PERENCANAAN | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 18 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 19 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 20 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | | 0 | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 21 | PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 22 | PENGELOLA STATISTIK PERIKANAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 23 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 24 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 25 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 26 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 27 | OPERATOR SPEEDBOAT | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 28 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 29 | PENGENMUDI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 30 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 31 | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 32 | PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 33 | ANALIS POTENSI KELAUTAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 34 | ANALIS PENANGGULANGAN PENCEMARAN SUMBER DAYA PESISIR | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 35 | ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 36 | ANALIS KONSERVASI DAN REHABILITASI WILAYAH PESISIR | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 37 | ANALIS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN IKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 38 | PENGELOLA PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN USAHA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 39 | KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 40 | PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 41 | ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 42 | ANALIS PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 43 | ANALIS KENELAYANAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 64 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 65 | PENGENMUDI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 66 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 67 | KEPALA SEKSI PENERAPAN MUTU | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 68 | ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 69 | ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 70 | KEPALA SEKSI PENGUJIAN | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 71 | ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 72 | ANALIS KIMIA | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 73 | KEPALA UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 74 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 75 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 76 | BENDAHARA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 77 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 78 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 79 | PENGENMUDI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 80 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 81 | KEPALA SEKSI BUDIDAYA LAUT | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 82 | ANALIS BENIH | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 83 | PENGELOLA PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 84 | KEPALA SEKSI BUDIDAYA PAYAU | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 85 | ANALIS BENIH | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 86 | ANALIS KIMIA | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 87 | PENGELOLA PENGAWASAN PEMBUDIDAYAAN IKAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 88 | KEPALA UPTD PELABUHAN PERIKANAN TENGGAYU II | | 1 | | | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 89 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 90 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 91 | BENDAHARA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 92 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 93 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 94 | OPERATOR SPEEDBOAT | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 95 | PENGENMUDI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 96 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 97 | PENAGIH RETRIBUSI | | | | 2 | | 3 | -1 | |
| 98 | KEPALA SEKSI TATA OPERASIONAL | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 99 | ANALIS KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 100 | SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 101 | PENGADMINISTRASI KEDATANGAN DAN PEMBERANGKATAN KAPAL | | | | 1 | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 102 | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 103 | ANALIS PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 104 | ANALIS SISTEM INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| | JUMLAH | 1 | 7 | 6 | 35 | 13 | 125 | -63 | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN XX
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 DINAS PARIWISATA

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS PARIWISATA | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | SEKRETARIS | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 3 | ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 4 | PERENCANA AHLI MUDA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 5 | PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 6 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 7 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 8 | ANALIS PERENCANAAN | | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 9 | BENDAHARA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 10 | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 11 | PENATA KEUANGAN | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 12 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 13 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 14 | ANALIS TATA USAHA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 15 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 16 | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 17 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 18 | PENYUSUN RENCANA SARANA DAN PRASARANA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 19 | ANALIS PENATAAN KAWASAN | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 20 | ANALIS OBJEK WISATA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 21 | ANALIS PARIWISATA | | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 22 | ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | | 1 | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 23 | PENGELOLA DATA KOMUNITAS ADAT | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 24 | KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 25 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 26 | ANALIS PARIWISATA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 27 | PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 28 | ANALIS EKONOMI KREATIF | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 29 | PENGELOLA INFORMASI KEPARIWISATAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 30 | PENGELOLA PROMOSI DAN INFORMASI WISATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 31 | PENGELOLA USAHA KEPARIWISATAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 32 | KEPALA BIDANG INDUSTRI PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN SDM | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 33 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 34 | ANALIS KEMITRAAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 35 | ANALIS INVESTASI DAN PERMODALAN USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 36 | PEMERIKSA KEPARIWISATAAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 37 | PENYUSUN BAHAN MATERI BIMBINGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 38 | PENGELOLA BAHAN PEMBERDAYAAN DAN PENYELENGGARAAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 39 | PENGADMINISTRASI BAHAN PENGUJIAN SDM | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 4 | 1 | 13 | 9 | | 46 | -18 | |

GOVERNOR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Desk Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 DINAS KEHUTANAN

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS KEHUTANAN | 1 | | | | | 1 | 0 | | |
| 2 | POLISI KEHUTANAN MADYA | | | | | 0 | 2 | -2 | | |
| 3 | POLISI KEHUTANAN MUDA | | | | | 1 | 3 | -2 | | |
| 4 | POLISI KEHUTANAN PERTAMA | | | | | 26 | 28 | -2 | | |
| 5 | POLISI KEHUTANAN PENYELIA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | POLISI KEHUTANAN MAHIR | | | | | 2 | 8 | -6 | | |
| 7 | POLISI KEHUTANAN TERAMPIL | | | | | 20 | 20 | 0 | | |
| 8 | POLISI KEHUTANAN PEMULA | | | | | 13 | 113 | -100 | | |
| 9 | PENYULUH KEHUTANAN MADYA | | | | | 0 | 7 | -7 | | |
| 10 | PENYULUH KEHUTANAN MUDA | | | | | 6 | 8 | -2 | | |
| 11 | PENYULUH KEHUTANAN PERTAMA | | | | | 37 | 40 | -3 | | |
| 12 | PENYULUH KEHUTANAN PENYELIA | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | PENYULUH KEHUTANAN MAHIR | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 14 | PENYULUH KEHUTANAN TERAMPIL | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 15 | PENYULUH KEHUTANAN PEMULA | | | | | 25 | 28 | -3 | | |
| 16 | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MADYA | | | | | 0 | 11 | -11 | | |
| 17 | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 18 | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PERTAMA | | | | | 14 | 7 | 7 | | |
| 19 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 20 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 21 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 22 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 23 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 24 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 25 | PENGEKSEMUDI | | | | 0 | | 0 | -1 | | |
| 26 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 0 | -1 | | |
| 27 | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | | | 0 | | | 0 | -1 | | |
| 28 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 29 | BENDAHARA | | | | 0 | | 0 | -1 | | |
| 30 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 2 | | 2 | 1 | | |
| 31 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 32 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 33 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 34 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN | | | | 0 | | 0 | -1 | | |
| 35 | ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 36 | KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 37 | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 38 | ANALIS PASAR HASIL HUTAN | | | | 0 | | 0 | -1 | | |
| 39 | ANALIS INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN | | | | 1 | | 1 | -1 | | |
| 40 | ANALIS PENGEMBANGAN HUTAN | | | | 0 | | 0 | -1 | | |
| 41 | PENGADMINISTRASI PERIZINAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 42 | PENGADMINISTRASI RISALAH | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 43 | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 44 | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 45 | PENELAHAH DATA STATISTIK PENGELOLAAN DAS | | | | 0 | | 0 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 46 | ANALIS BENIH | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 47 | ANALIS HUTAN DAN LAHAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 48 | PRANATA DAERAH ALIRAN SUNGAI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 49 | PENGELOLA PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 50 | OPERATOR GLOBAL POSITIONING SYSTEM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 51 | KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 52 | POLISI KEHUTANAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 53 | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 54 | ANALIS INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 55 | ANALIS KEBAKARAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 56 | ANALIS REHABILITASI DAN KONSERVASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 57 | PENGELOLA PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 58 | PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 59 | KEPALA BIDANG PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN HUTAN ADAT | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 60 | PENYULUH KEHUTANAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 61 | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 62 | ANALIS PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 63 | ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | 2 | | 1 | 1 | | |
| 64 | ANALIS INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 65 | PENGELOLA PROGRAM PENYULUHAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 66 | PENGELOLA PERHUTANAN SOSIAL DAN ANEKA USAHA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 67 | KEPALA UPTD KPH TARAKAN | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 68 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD KPH KOTA TARAKAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 69 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 70 | BENDAHARA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 71 | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 72 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 73 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 0 | -1 | |
| 74 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 0 | -1 | |
| 75 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 0 | -1 | |
| 76 | KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPTD KPH KOTA TARAKAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 77 | ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 78 | PENGELOLA PERHUTANAN SOSIAL DAN ANEKA USAHA | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 79 | PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 0 | | 0 | -2 | |
| 80 | PENGENJUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 81 | KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN UPTD KPH KOTA TARAKAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 82 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 83 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 84 | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM | | | | 1 | | 1 | -1 | |
| 85 | KEPALA UPTD KPH NUNUKAN | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 86 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD KPH KABUPATEN NUNUKAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 87 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 88 | BENDAHARA | | | | 0 | | 0 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 89 | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 90 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 91 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 92 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 93 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 94 | KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPTD KPH KABUPATEN NUNUKAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 95 | ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 96 | PENGELOLA PERHUTANAN SOSIAL DAN ANEKA USAHA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 97 | PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 98 | PENGENMUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 99 | KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN UPTD KPH KABUPATEN NUNUKAN | | | 0 | | | 1 | -1 | | |
| 100 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 101 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 102 | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 103 | KEPALA UPTD KPH KTT | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 104 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD KPH KABUPATEN TANAH TIDUNG | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 105 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 106 | BENDAHAARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 107 | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 108 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 109 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 110 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 111 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 112 | KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPTD KPH KABUPATEN TANA TIDUNG | | | 0 | | | | 1 | -1 | |
| 113 | ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 114 | PENGELOLA PERHUTANAN SOSIAL DAN ANEKA USAHA | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 115 | PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 116 | PENGENJUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 117 | KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN UPTD KPH KABUPATEN TANA TIDUNG | | | 0 | | | | 1 | -1 | |
| 118 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 119 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 120 | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 121 | KEPALA UPTD KPH MALINAU | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 122 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD KPH KABUPATEN MALINAU | | | 0 | | | | 1 | -1 | |
| 123 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 124 | BENDAHAARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 125 | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 126 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 127 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 128 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 129 | PRAMU KEBERSIHAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|------|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 150 | PENGELOLA PERHUTANAN SOSIAL DAN ANEKA USAHA PRANATA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 151 | PENGEMUDI MOBIL PEMADAM KEBAKARAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 152 | KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN UPTD KPH KABUPATEN BULUNGGAH | | | 1 | | | | 1 | -1 | |
| 153 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 154 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 155 | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 156 | JUMLAH | 1 | 10 | 13 | 66 | 158 | | 450 | -202 | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

tttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4



LAMPIRAN XXII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PECAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PECAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENCAWAI | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 1 | | | | | 1 | 0 | | |
| 2 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 3 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 4 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 5 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 6 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 7 | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 8 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 9 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 10 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 11 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 12 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 13 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 14 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 0 | 1 | | |
| 15 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 16 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 17 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 18 | KEPALA BIDANG MINERAL DAN BATU BARA | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 19 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 20 | PENGELOLA PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 21 | ANALIS WILAYAH PERTAMBANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 22 | ANALIS PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 23 | PENGELOLA PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 24 | ANALIS KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 25 | PENGELOLA PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 26 | ANALIS PERTAMBANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 27 | ANALIS USAHA JASA MINERAL DAN BATUBARA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 28 | ANALIS PELAYANAN USAHA MINERAL DAN BATUBARA | | | | 2 | | 4 | -2 | |
| 29 | ANALIS KONSERVASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | 2 | | 1 | 1 | |
| 30 | PENGELOLA DATA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 31 | ANALIS RENCANA PRODUKSI DAN PEMANFAATAN MINERAL DAN BATUBARA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 32 | ANALIS PENGAWASAN EKSPLOKASI DAN PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 33 | PENGELOLA PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 34 | KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 35 | PENYELIDIK BUMI AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 36 | PENYELIDIK GEOLOGI | | | | 1 | | 0 | 1 | |
| 37 | PEMERIKSA SEKTOR SUMBER DAYA AIR | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 38 | ANALIS POTENSI SUMBER AIR TANAH | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 39 | PENYELIDIK BUMI AHLI MUDA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 40 | ANALIS KESELAMATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI | | | | 1 | | 0 | 1 | |
| 41 | ANALIS POTENSI SUMBER AIR TANAH | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 42 | KEPALA SEKSI PEMETAAN GEOLOGI, SUMBER DAYA DAN AIR TANAH | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 43 | PENYELIDIK GEOLOGI | | | | 1 | | 2 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 44 | KEPALA BIDANG KETENAGALISTRIKAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 45 | INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 46 | ANALIS KETENAGALISTRIKAN | | | | 1 | | 0 | 1 | | |
| 47 | ANALIS PROGRAM KETENAGALISTRIKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 48 | PENGELOLA PEMANFAATAN ENERGI DAN PENYEDIAAN LISTRIK PERDESAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 49 | ANALIS KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN | | | | 1 | | 0 | 1 | | |
| 50 | ANALIS KETENAGALISTRIKAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 51 | PENGAWAS KETENAGALISTRIKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 52 | PENGAWAS KETENAGALISTRIKAN | | | | 1 | | 0 | 1 | | |
| 53 | ANALIS LINDUNGAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 54 | ANALIS KELAIKAN TEKNIK DAN KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 55 | KEPALA BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 56 | INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 57 | PENGELOLA ENERGI, MINYAK DAN GAS BUMI | | | | 1 | | 0 | 1 | | |
| 58 | ANALIS PROGRAM ENERGI BARU TERBARUKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 59 | PEMERIKSA KELISTRIKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 60 | PENGELOLA PEMANFAATAN ENERGI DAN PENYEDIAAN LISTRIK PERDESAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 61 | ANALIS KONSERVASI ENERGI | | | | 1 | | 0 | 1 | | |
| 62 | PEMERIKSA KELISTRIKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 63 | ANALIS PELAYANAN DAN PENGAWASAN USAHA BIOENERGI DAN ANEKA ENERGI BARU TERBARUKAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 64 | ANALIS PROGRAM ENERGI BARU TERBARUKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 5 | 3 | 24 | 11 | 72 | -28 | |

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Bidang Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003



LAMPIRAN XXIII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAJAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | PENGUJI MUTU BARANG | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 3 | PENGAWAS KOPERASI | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 4 | SEKRETARIS | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 5 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 6 | BENDAHARA | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 7 | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 8 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 9 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 10 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 11 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 12 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 13 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 14 | PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 15 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 16 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 17 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 18 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 19 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 20 | PENGENMUDI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 21 | KEPALA BIDANG INDUSTRI | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 22 | PENYULUH PERINDUSRIAN DAN PERDAGANGAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 23 | ANALIS PROSES AKREDITASI INDUSTRI | | | | 1 | | 0 | 1 | |
| 24 | ANALIS PROSES AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, PERSONEL, HALAL, PANGAN ORGANIK | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 25 | ANALIS PENGEMBANGAN USAHA AGROINDUSTRI | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 26 | ANALIS INDUSTRI DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 27 | ANALIS PROSES UJI BANDING | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 28 | ANALIS TEKNOLOGI INDUSTRI | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 29 | ANALIS PROSES UJI KOMPARASI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 30 | PENGELOLA SARANA PERINDUSTRIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 31 | PENGELOLA SARANA PERINDUSTRIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 32 | KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 33 | PENGAWAS PERDAGANGAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 34 | ANALIS PENGEMBANGAN PASAR | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 35 | PENYUSUN RENCANA ANALISIS PASAR DALAM NEGERI | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 36 | ANALIS MUTU PRODUK | | | | 2 | | 4 | -2 | |
| 37 | PENYUSUN RENCANA JARINGAN DISTRIBUSI | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 38 | PENGELOLA FASILITASI DAN MEDIASI PERLINDUNGAN KONSUMEN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 39 | PENGELOLA DISTRIBUSI DAN PEMASARAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 40 | PENGADMINISTRASI PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN AKSES PASAR | | | | 0 | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEKAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEKAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 41 | KEPALA BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 42 | ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 43 | ANALIS PERDAGANGAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 44 | FASILITATOR PROMOSI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 45 | PENYUSUN RENCANA ANALISIS PASAR LUAR NEGERI | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 46 | PENYUSUN RENCANA INFORMASI PASAR LUAR NEGERI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 47 | ANALIS KERJASAMA BILATERAL DAN REGIONAL | | | | 1 | | 3 | -2 | | |
| 48 | PENGELOLA FASILITASI DAN MEDIASI PEMBANGUNAN USAHA PERDAGANGAN EKSPOR- IMPOR | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAJAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 49 | KEPALA BIDANG KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 50 | PENGAWAS KOOPERASI AHLI MUDA | | 7 | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 51 | ANALIS PENGAWASAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 52 | ANALIS KOOPERASI | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 53 | ANALIS KERJASAMA DAN PERMODALAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 54 | ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 55 | FASILITATOR KEWIRAUSAHAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 56 | PENGELOLA PERMODALAN KOOPERASI DAN USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| | JUMLAH | 1 | 5 | 2 | 26 | 13 | 87 | -40 | | |

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 49 | KEPALA BIDANG KOOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 50 | PENGAWAS KOOPERASI AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 51 | ANALIS PENGAWASAN | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 52 | ANALIS KOOPERASI | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 53 | ANALIS KERJASAMA DAN PERMODALAN | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 54 | ANALIS PEMASARAN DAN KERJASAMA | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 55 | FASILITATOR KEWIRAUSAHAAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 56 | PENGELOLA PERMODALAN KOOPERASI DAN USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 5 | 2 | 26 | 13 | 87 | -40 | |

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PECAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PECAWAI BERDASARKAN ABK | | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|----|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENCAWAI | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 1 | | | | | 1 | 0 | | |
| 2 | PENCAWAI KETENAGAKERJAAN MADYA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 3 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 4 | PENCAWAI KETENAGAKERJAAN MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 5 | INSTRUKTUR MUDA | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 6 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PERTAMA | | | | | 1 | 2 | -1 | | |
| 7 | PENCAWAI KETENAGAKERJAAN PERTAMA | | | | | 7 | 10 | -3 | | |
| 8 | PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERTAMA PRANATA KOMPUTER PERTAMA | | | | | 0 | 3 | -3 | | |
| 9 | INSTRUKTUR PERTAMA | | | | | 0 | 2 | -2 | | |
| 10 | PENCAWAI KERJA PERTAMA | | | | | 0 | 3 | -3 | | |
| 11 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 12 | PERENCANA AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 13 | ANALIS PERENCANAAN | | | | | 0 | 1 | -1 | | |
| 14 | ANALIS LAPORAN KEUANGAN | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 15 | BENDAHARA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 16 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 17 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 18 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | | 1 | 2 | -1 | | |
| 19 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPECAWAIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 20 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | | 1 | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 22 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 23 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 24 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 4 | | 4 | 0 | |
| 25 | KEPALA BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 26 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 27 | ANALIS TENAGA KERJA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 28 | KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 29 | ANALIS TENAGA KERJA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 30 | PENYULUH TENAGA KERJA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 31 | KEPALA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA | | | | | | | | |
| 32 | ANALIS TENAGA KERJA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 33 | KEPALA BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 34 | MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | ANALIS KOMPETENSI DAN KUALIFIKASI TENAGA KERJA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 36 | KEPALA SEKSI PENGAWASAN NORMA KETENAGAKERJAAN DAN K3 | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 37 | ANALIS BAHAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 38 | KEPALA SEKSI PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN | | | | | | | | |
| 39 | ANALIS BAHAN PENGUPAHAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 40 | KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 41 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 42 | PENGGERAK SWADAYA AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 43 | ANALIS KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | 1 | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 44 | PENYULUH TRANSMIGRASI | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 45 | PRANATA KETRANSMIGRASIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 4 | 3 | 17 | 16 | 63 | -22 | |

GOVERNOR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 DAN PENELITIAN
 PENGEMBANGAN

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 1 | KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | SEKRETARIS | | 1 | | | | | 1 | 0 |
| 3 | PERENCANA AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 |
| 4 | ANALIS PERENCANAAN | | | | | | | 1 | 0 |
| 5 | ANALIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN | | | | 0 | | | 1 | -1 |
| 6 | PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN | | | | 0 | | | 1 | -1 |
| 7 | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM | | | | 0 | | | 1 | -1 |
| 8 | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | | | 1 | | | | 1 | 0 |
| 9 | BENDAHARA | | | | 0 | | | 1 | -1 |
| 10 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | | 2 | -1 |
| 11 | PENATA LAPORAN KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 |
| 12 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 2 | | | 2 | 0 |
| 13 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 2 | | | 2 | 0 |
| 14 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | | 1 | 0 |
| 15 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 |
| 16 | ANALIS KERJASAMA TEKNIS STANDARISASI | | | | 0 | | | 1 | -1 |
| 17 | ANALIS TATA USAHA | | | | 0 | | | 1 | -1 |
| 18 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | | 1 | -1 |
| 19 | PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | | 1 | -1 |
| 20 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 2 | | | 2 | 0 |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 21 | PENGADMINISTRASI PERSURATAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 22 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 23 | PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 24 | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 25 | PERENCANA AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 26 | ANALIS JALAN JEMBATAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 27 | ANALIS PENGAMBANGAN WILAYAH | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 28 | ANALIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 29 | ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR | | | | 1 | | 4 | -3 | |
| 30 | ANALIS PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 31 | ANALIS PENGEMBANGAN WILAYAH | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 32 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 33 | ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 34 | ANALIS PETA WILAYAH | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 35 | ANALIS SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 36 | PENGELOLA BAHAN RENCANA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 37 | PENGELOLA GEOSPASIAL | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 38 | PENGELOLA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 39 | PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 40 | KEPALA BIDANG PENGAJIAN PERENCANAAN DAERAH DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 41 | PERENCANA AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 42 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 4 | | 4 | 0 | |
| 43 | ANALIS DATA EKONOMI MAKRO | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 44 | ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAJAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 66 | KEPALA BIDANG SOSBUD, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 67 | PERENCANA AHLI MUDA | | | | | 2 | 3 | -1 | |
| 68 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 69 | ANALIS INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 70 | ANALIS KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 71 | ANALIS PEMERINTAHAN DAERAH | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 72 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 73 | ANALIS SISTEM INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 74 | PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 75 | PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 76 | PENGELOLA PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN KESEHATAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 77 | PENGADMINISTRASI PEMERINTAHAN | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 78 | KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 79 | PERENCANA AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 80 | ANALIS DATA DI BIDANG EVALUASI DAN KERJASAMA PENELITIAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 81 | ANALIS HASIL PENELITIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 82 | ANALIS PEMANFAATAN TEKNOLOGI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 83 | ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 84 | PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 85 | PENYUSUN PROGRAM KREATIVITAS DAN INOVASI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 86 | PENGELOLA DATA KREATIVITAS DAN INOVASI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 87 | PENGELOLA PENELITIAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 88 | PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 89 | PENGADMINISTRASI EVALUASI DAN KERJASAMA PENELITIAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| | JUMLAH | 1 | 6 | 2 | 38 | 15 | 130 | -68 | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
ttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
BEBAN KERJA PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEKAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEKAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 3 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 4 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 5 | ANALIS KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 6 | PENGELOLA ANGGARAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 7 | KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN PEMBIAYAAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 8 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 9 | ANALIS KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 10 | PENGELOLA ANGGARAN | | | | 2 | | | 1 | 1 | |
| 11 | KEPALA SUB BIDANG BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 12 | ANALIS MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 13 | ANALIS KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 14 | PENGELOLA DATA KEUANGAN DAERAH | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 15 | KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 16 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 17 | ANALIS SISTEM INFORMASI PERBENDAHARAAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 18 | ANALIS KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 19 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 20 | KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 21 | ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 22 | PENGOLAH DATA LAPORAN KAS | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 23 | KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 24 | ANALIS PERBENDAHARAAN | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 25 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | 4 | -3 | |
| 26 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 5 | | 3 | 2 | |
| 27 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 28 | KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN ASET | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 29 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | ANALIS KEUANGAN | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 31 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 32 | KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 33 | ANALIS APLIKASI DAN PENGELOLAAN DATA SISTEM KEUANGAN | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 34 | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 35 | ANALIS KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 36 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 37 | PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 38 | KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN ASET | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 39 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 40 | ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH | | | | 6 | | 5 | 1 | |
| 41 | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 42 | SEKRETARIS | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 43 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 44 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 45 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 46 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 47 | BENDAHARA | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 48 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 49 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 50 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 51 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 52 | PRANATA KEARSIPAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 53 | PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 54 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 4 | 7 | 44 | 4 | | 78 | -18 | |

GOBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
titd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN XXVII
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 1 | KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | ANALIS KEBIJAKAN MADYA | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 3 | PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA | | | | | | 0 | 6 | -6 |
| 4 | PRANATA KOMPUTER PERTAMA | | | | | | 0 | 5 | -5 |
| 5 | PERENCANA PERTAMA | | | | | | 0 | 1 | -1 |
| 6 | SEKRETARIS | | 1 | | | | | 1 | 0 |
| 7 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | | | 0 | 1 | -1 |
| 9 | BENDAHARA | | | | | | 2 | 2 | 0 |
| 10 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | | | 1 | 2 | -1 |
| 11 | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN LAPORAN | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 13 | PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 14 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | | 1 | 0 |
| 15 | PENGELOLA SIMPEG | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 16 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | | | 2 | 2 | 0 |
| 17 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 18 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | | | 1 | 1 | 0 |
| 19 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | | | 1 | 2 | -1 |
| 20 | PENGEEMUDI | | | | | | 0 | 1 | -1 |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 21 | KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 22 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 23 | ANALIS PENAGIHAN PAJAK | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 24 | ANALIS DESAIN PAMERAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 25 | KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN INTENSIFIKASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 26 | ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 27 | ANALIS PERENCANAAN STRATEGIS | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 28 | KEPALA SUB BIDANG PERUMUSAN STANDARISASI KEBIJAKAN OPERASIONAL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 29 | PENYUSUN RENCANA KEBIJAKAN | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 30 | ANALIS PENDAPATAN DAERAH | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 31 | KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 32 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 33 | PEMERIKSA TEKNOLOGI INFORMASI | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 34 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 35 | KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN DAN EVALUASI SISTEM ADMINISTRASI PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 36 | PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 37 | PENGELOLA PENDAFTARAN, PENDATAAN PAJAK, DAN RETRIBUSI | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 38 | KEPALA SUB BIDANG PENDAMPINGAN WAJIB PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | 1 | | | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 39 | ANALIS PENAGIHAN PAJAK | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 40 | PENGELOLA PAJAK DAERAH | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 41 | KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 42 | ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 43 | ANALIS PENAGIHAN PAJAK | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 44 | ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 45 | KEPALA SUB BIDANG BASIS DATA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 46 | ANALIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 47 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 48 | KEPALA SUB BIDANG MONITORING DAN EVALUASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 49 | PENGADMINISTRASI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 50 | ANALIS PENDAPATAN DAERAH | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 51 | KEPALA UPT. BAPENDA WILAYAH KOTA TARAKAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 52 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 53 | BENDAHARA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 54 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 55 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 56 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 4 | | 4 | 0 | | |
| 57 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 58 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 5 | | 5 | 0 | | |
| 59 | PENGEEMUDI | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 60 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 61 | PRAMU BAKTI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 62 | KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENEJAPAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 63 | ANALIS PEMERIKSAAN PAJAK | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 64 | ANALIS PAJAK DAERAH | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 65 | PENGELOLA DATA DAN POTENSI PAJAK | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 66 | PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 67 | PENGELOLA PENDAFTARAN, PENDATAAN PAJAK, DAN RETRIBUSI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 68 | PENGADMINISTRASI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 69 | KEPALA SEKSI PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 70 | ANALIS PENAGIHAN PAJAK | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 71 | ANALIS PAJAK DAERAH | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 72 | PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 73 | PENGADMINISTRASI PAJAK | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 74 | KEPALA UPT. BAPENDA WILAYAH KABUPATEN BULUNGAN | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 75 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 76 | BENDAHARA | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 77 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 78 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 79 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 3 | | 3 | 0 | |
| 80 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 81 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 2 | | 2 | 0 | |
| 82 | PENGENMUDI | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 83 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 84 | PRAMU BAKTI | | | | 1 | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 85 | KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 86 | ANALIS PEMERIKSAAN PAJAK | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 87 | ANALIS PAJAK DAERAH | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 88 | PENGELOLA DATA DAN POTENSI PAJAK | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 89 | PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 90 | PENGELOLA PENDAFTARAN, PENDATAAN PAJAK, DAN RETRIBUSI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 91 | PENGADMINISTRASI PAJAK | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 92 | KEPALA SEKSI PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 93 | ANALIS PENAGIHAN PAJAK | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 94 | PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 95 | PENGADMINISTRASI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 96 | KEPALA UPT. BAPENDA WILAYAH KABUPATEN MALINAU | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 97 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 98 | BENDAHARA | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 99 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 2 | | | 1 | 1 | |
| 100 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 101 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 102 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 103 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 104 | PENGENMUDI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 105 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 106 | PRAMU BAKTI | | | | 0 | | | 0 | 0 | |
| 107 | KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 108 | ANALIS PEMERIKSAAN PAJAK | | | | 0 | | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 109 | ANALIS PAJAK DAERAH | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 110 | PENGELOLA DATA DAN POTENSI PAJAK | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 111 | PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 112 | PENGELOLA PENDAFTARAN, PENDATAAN PAJAK, DAN RETRIBUSI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 113 | PENGADMINISTRASI PAJAK | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 114 | KEPALA SEKSI PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 115 | ANALIS PENAGIHAN PAJAK | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 116 | PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 117 | PENGADMINISTRASI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 118 | KEPALA UPT. BAPENDA WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 119 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 120 | BENDAHARA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 121 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 122 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 123 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 4 | -3 | | |
| 124 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 125 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 126 | PENGENMUDI | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 127 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 1 | | 3 | -2 | | |
| 128 | PRAMU BAKTI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 129 | KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 130 | ANALIS PEMERIKSAAN PAJAK | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 131 | ANALIS PAJAK DAERAH | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 132 | PENGELOLA DATA DAN POTENSI PAJAK | | | | 1 | | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 133 | PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 134 | PENGELOLA PENDAFTARAN, PENDATAAN PAJAK, DAN RETRIBUSI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 135 | PENGADMINISTRASI PAJAK | | | | 2 | | 4 | -2 | | |
| 136 | KEPALA SEKSI PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 137 | ANALIS PENAGIHAN PAJAK | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 138 | PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 139 | PENGADMINISTRASI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 140 | KEPALA UPT. BAPENDA WILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 141 | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 142 | BENDAHARA | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 143 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 144 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 145 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 146 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| 147 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 148 | PENGEMUDI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 149 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 150 | PRAMU BAKTI | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 151 | KEPALA SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN | | | 1 | | | 1 | 0 | | |
| 152 | ANALIS PEMERIKSAAN PAJAK | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 153 | ANALIS PAJAK DAERAH | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 154 | PENGELOLA DATA DAN POTENSI PAJAK | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 155 | PENGELOLA DATA PELAYANAN PERPAJAKAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 156 | PENGELOLA PENDAFTARAN, PENDATAAN PAJAK, DAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|------|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| | RETRIBUSI | | | | | | | | |
| 157 | PENGADMINISTRASI PAJAK | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 158 | KEPALA SEKSI PENAGIHAN DAN PEMBUKUAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 159 | ANALIS PENAGIHAN PAJAK | | | | 1 | | 1 | 0 | |
| 160 | PENGOLAH DATA PENAGIHAN PAJAK | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| 161 | PENGADMINISTRASI NOTA PERHITUNGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | | | | 0 | | 1 | -1 | |
| | JUMLAH | 1 | 9 | 22 | 80 | 6 | 220 | -102 | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttt
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4



LAMPIRAN XXVIII
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 1 | | | | | | 1 | 0 | |
| 2 | PRANATA KOMPUTER PERTAMA | | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 3 | ANALIS SDM APARATUR PERTAMA | | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 4 | ASSESSOR SDM APARATUR PERTAMA | | | | | 0 | | 5 | -5 | |
| 5 | SEKRETARIS | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 6 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 7 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 8 | PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 9 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 10 | PRANATA KEARSIPAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 11 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 12 | PENGADMINISTRASI PERSURATAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 13 | PENGEEMUDI | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 14 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | | 3 | -3 | |
| 15 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 16 | BENDAHARA | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 17 | ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 18 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 19 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 20 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |
| 21 | PENGELOLA KEUANGAN | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 22 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 0 | | | 1 | -1 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|----|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 23 | KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN INFORMASI PEGAWAI | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 24 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | | |
| 25 | ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA | | | | | 1 | 1 | 0 | | |
| 26 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 27 | ANALIS KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 28 | ANALIS PERMASALAHAN HUKUM | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 29 | ANALIS PENEKAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 30 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 31 | PERANCANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 32 | ANALIS SISTEM INFORMASI | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 33 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 34 | PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 35 | PENGELOLA DATA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 36 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 37 | KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI | | 1 | | | | 1 | 0 | | |
| 38 | ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | | |
| 39 | ANALIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | | | | 1 | | 2 | -1 | | |
| 40 | PENYUSUN RENCANA MUTASI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 41 | ANALIS PENGEMBANGAN KARIR | | | | 2 | | 2 | 0 | | |
| 42 | ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 43 | ANALIS TATA RAJA | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 44 | PENGELOLA FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI | | | | 1 | | 1 | 0 | | |
| 45 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 46 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 1 | | 1 | 0 | | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 47 | PENGELOLA PENGEMBANGAN KARIR | | | | 0 | | 1 | -1 | | |
| 48 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | 2 | | 3 | -1 | | |
| | JUMLAH | 1 | 3 | 2 | 24 | 6 | 65 | -29 | | |

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,
tttd
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN XXIX
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEKAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEKAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|--|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAJAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 1 | KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 1 | | | | | 1 | 0 | | |
| 2 | SEKRETARIS | | 1 | | | | | 1 | 0 | |
| 3 | WIDYAISWARA UTAMA | | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 4 | WIDYAISWARA MADYA | | | | | 2 | | 5 | -3 | |
| 5 | WIDYAISWARA MUDA | | | | | 3 | | 4 | -1 | |
| 6 | WIDYAISWARA PERTAMA | | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 7 | ARSIPARIS PERTAMA | | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 8 | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 9 | ANALIS PERENCANAAN | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 10 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 11 | ANALIS PENGEMBANGAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 12 | BENDAHARA | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 13 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 14 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 15 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 16 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 17 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | 1 | | | 2 | -1 | |
| 18 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | 2 | | | 2 | 0 | |
| 19 | ANALIS PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR | | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 20 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | 0 | | | 2 | -2 | |
| 21 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | 1 | | | 1 | 0 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BESETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PEGAWAI | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 22 | PENGADMINISTRASI PERSURATAN | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 23 | PENGEMUDI | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 24 | PETUGAS KEAMANAN | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 25 | KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIK | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 26 | PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA | | | | | 3 | 3 | 0 | |
| 27 | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 28 | ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 29 | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 30 | ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 31 | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 32 | ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 33 | PRANATA DIKLAT | | | | 1 | | 2 | -1 | |
| 34 | PRANATA DIKLAT | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 35 | PRANATA DIKLAT | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 36 | KEPALA BIDANG SERTIFIKASI, KELEMBAGAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 37 | PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 38 | ANALIS DATA DAN KERJASAMA DIKLAT | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 39 | ANALIS DIKLAT | | | | 1 | | 3 | -2 | |
| 40 | ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI | | | | 0 | | 3 | -3 | |
| 41 | PENGELOLA SERTIFIKASI | | | | 0 | | 2 | -2 | |
| 42 | PRANATA DIKLAT | | | | 0 | | 3 | -3 | |

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|----|-----------------------------------|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | | |
| 43 | PRANATA SISTEM INFORMASI DIKLAT APARATUR | | | | 0 | | 3 | -3 | | |
| 44 | PRANATA DIKLAT | | | | 0 | | 3 | -3 | | |
| 45 | PENGADMINISTRASI KERJASAMA PELATIHAN | | | | 0 | | 2 | -2 | | |
| | JUMLAH | 1 | 3 | 2 | 17 | 12 | 96 | -61 | | |

GOVERNOR KALIMANTAN UTARA,

ZAINAL ARIFFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

td
SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

MUHAMMAD GOZALI, S.E., MH
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN XXX
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS
 BEBAN KERJA PADA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

| NO. | NAMA JABATAN | BEZETTING PEGAWAI SAAT INI | | | | | KEBUTUHAN PEGAWAI BERDASARKAN ABK | +/- | KET |
|-----|---|----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-----|-----|
| | | JABATAN PIMPINAN TINGGI | JABATAN ADMINISTRATOR | JABATAN PENGAWAS | JABATAN PELAKSANA | JABATAN FUNGSIONAL | | | |
| 1 | KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 0 | | | | | 1 | -1 | |
| 2 | SEKRETARIS | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| 3 | KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 4 | ANALIS BARANG MILIK NEGARA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | ANALIS TATA USAHA | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | PENGELOLA KEPEGAWAIAN | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | PENGELOLA DATA | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 8 | PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | PENGADMINISTRASI UMUM | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | ANALIS DATA DAN INFORMASI | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | ANALIS PERENCANAAN | | | | | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM | | | | | 1 | 2 | -1 | |
| 14 | ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN | | | | | 0 | 1 | -1 | |
| 15 | VERIFIKATOR KEUANGAN | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 16 | PENGADMINISTRASI KEUANGAN | | | | | 2 | 2 | 0 | |
| 17 | KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN | | | 1 | | | 1 | 0 | |
| 18 | KEPALA SEKSI PENCEGAHAN | | | | | | 1 | 0 | |
| 19 | PENYULUH BENCANA | | | | | | 1 | -3 | |

